



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Tahun 2015

### Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung



## Daftar Isi

A. PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang.....	2
a. Gambaran Umum dan Tupoksi Diskominfo Kota Bandung	3
b. Kepegawaian	4
2. Dasar Hukum.....	7
3. Isu Strategis yang Dihadapi.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi .....	9
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015	10
C. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015	11
1. Target dan Analisis Target Renstra 2013-2018.....	11
2. Capaian Kinerja Tahun 2015.....	13
3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis .....	16
4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015.....	18
5. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2013-2018.....	19
D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	21
1. Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi.....	21
2. Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center .....	26
3. Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi .....	31
4. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu..	36
5. Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) .....	39
6. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .....	45
7. Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung.....	49
8. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika.....	53
9. Nilai evaluasi LKIP .....	58
10. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.....	61
E. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	64
F. KESIMPULAN/ PENUTUP	65

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Diskominfo dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

# ***Diskominfo***

## **Kota Bandung**

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP Diskominfo Kota Bandung Tahun 2015 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### a. Gambaran Umum dan Tupoksi Diskominfo Kota Bandung

Diskominfo Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi
2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi: Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Telematika, Bidang Diseminasi Informasi, dan Bidang Hubungan Masyarakat.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan, dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

##### a. Sekretaris, membawahi:

- i. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
- ii. Sub.Bagian Keuangan dan Program

##### b. Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahi :

- i. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
- ii. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi

##### c. Bidang Telematika membawahi:

- i. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
- ii. Seksi e-Government dan Pemberdayaan Telematika

##### d. Bidang Diseminasi Informasi, membawahi:

- i. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
- ii. Seksi Komunikasi dan Multimedia;

##### e. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi:

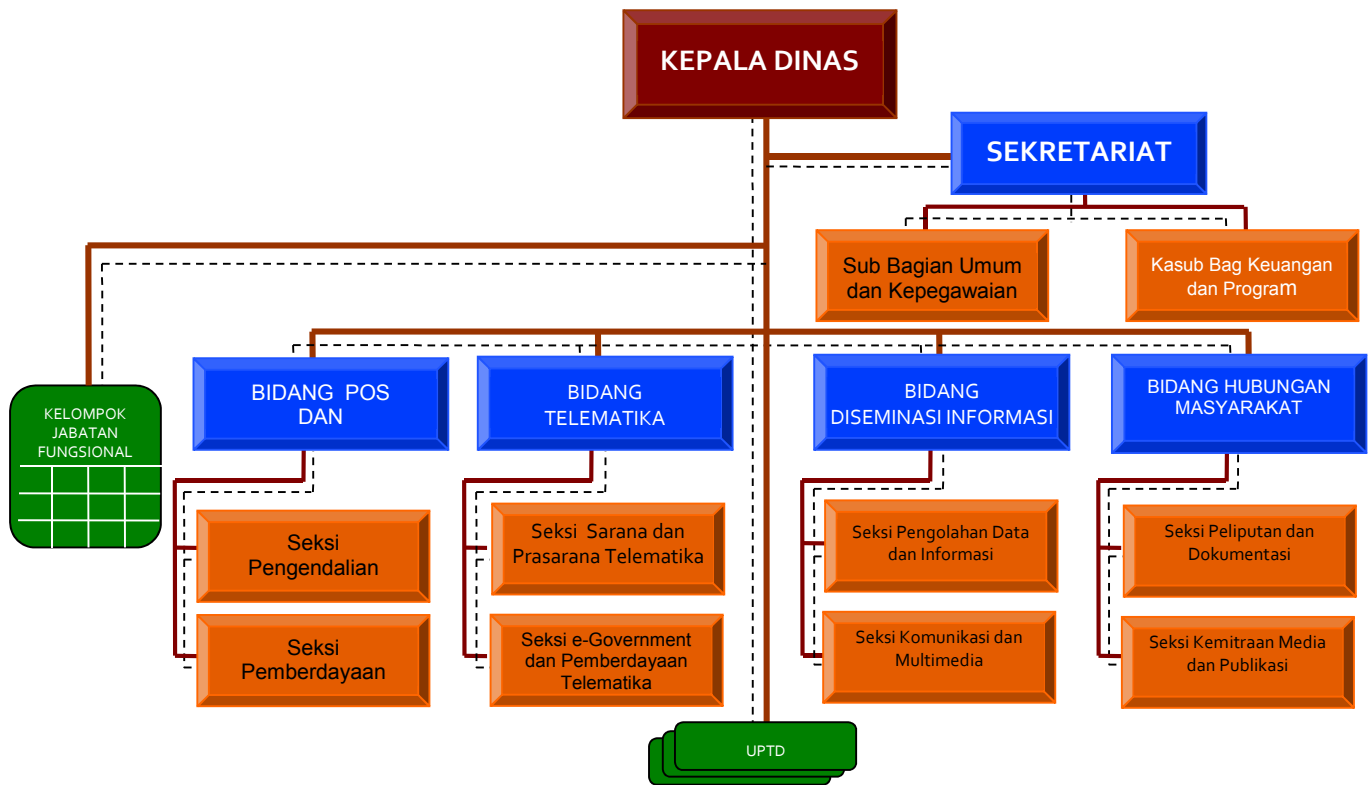
- i. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
- ii. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi

##### f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

##### g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.




**GAMBAR 1. ORGANIGRAM DISKOMINFO KOTA BANDUNG**

### b. Kepegawaian

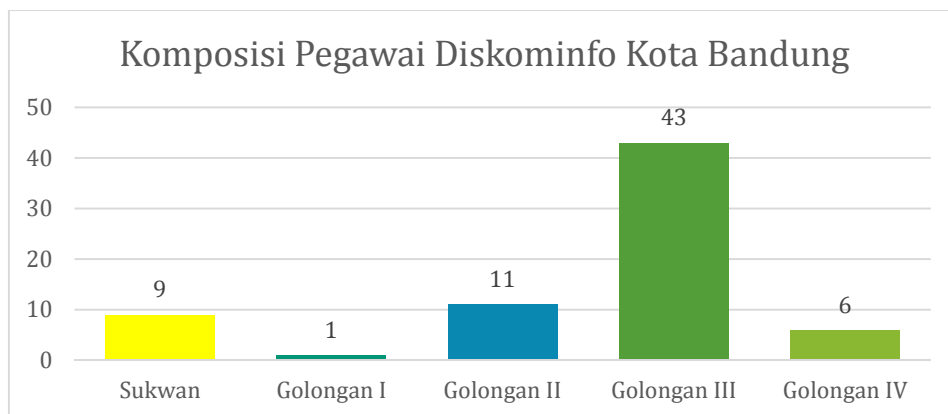
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2015, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 61 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 4 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 12 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 2 orang, serta pelaksana sebanyak 41 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.



**TABEL 1. KOMPOSISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN**

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kepala Seksi dan Kepala UPT				12		12
5	Sekretaris UPT				2		2
6	Staf					41	41
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>61</b>

Selain pegawai berstatus PNS, Diskominfo Kota Bandung juga dibantu oleh 9 (Sembilan) orang tenaga sukarelawan/ honorer (sukwan). Gambar 2 menunjukkan komposisi golongan III menempati jumlah terbanyak di Diskominfo Kota Bandung, diikuti golongan II, dan sukwan. Sebagai ilustrasi perbandingan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan golongan PNS di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 2.

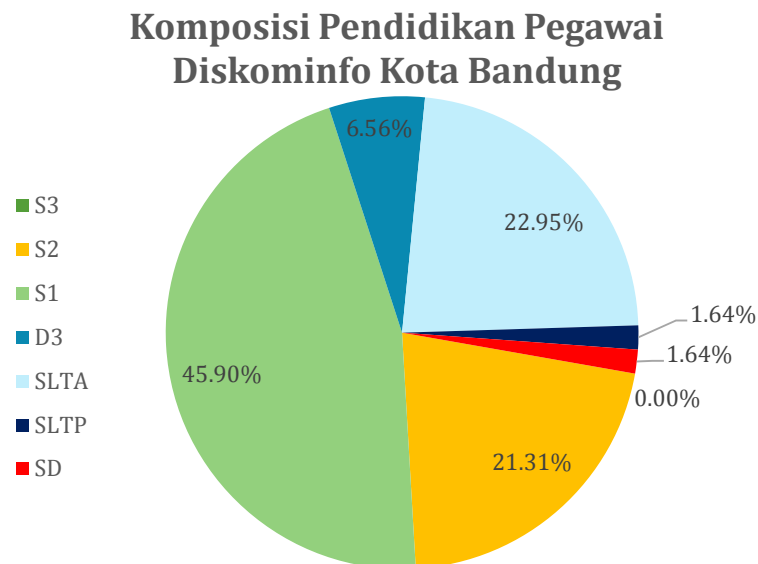
**GAMBAR 2. KOMPOSISI PEGAWAI DISKOMINFO KOTA BANDUNG BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN GOLONGAN**

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Diskominfo Kota Bandung dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaan pendidikan pegawai Diskominfo dapat dilihat di tabel 2. Sebagai ilustrasi komposisi pendidikan pegawai di lingkungan Diskominfo Kota Bandung, ditunjukkan oleh gambar 3.

TABEL 2. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris		1						1
3	Kepala Bidang		3	1					4
4	Kepala Seksi dan Kepala UPT		2	10					12
5	Sekretaris UPT		1	1					2
6	Staf		5	16	4	14	1	1	41
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>61</b>
	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>21.31</b>	<b>45.90</b>	<b>6.56</b>	<b>22.95</b>	<b>1.64</b>	<b>1.64</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



GAMBAR 3. KOMPOSISI PENDIDIKAN PEGAWAI DISKOMINFO KOTA BANDUNG

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 13 orang (21,31%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang dan 2 orang Kepala Seksi. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 28 orang (45,90%), D3 sebanyak 2 orang (6,56%), SLTA sebanyak 14 orang (22,95%), SLTP sebanyak 1 orang (1,64%), dan pegawai dengan pendidikan SD sebanyak 1 orang (1, 64%).

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung.

## 2. Dasar Hukum

Dalam menyusun LKIP, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berpatokan kepada dasar hukum yang berlaku terkait penyusunan dan pelaporan LKIP. Adapun dasar hukum yang digunakan pada penyusunan LKIP adalah sebagai berikut:

### Dasar Hukum

Dasar hukum menjadi acuan penyusunan LKIP Tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

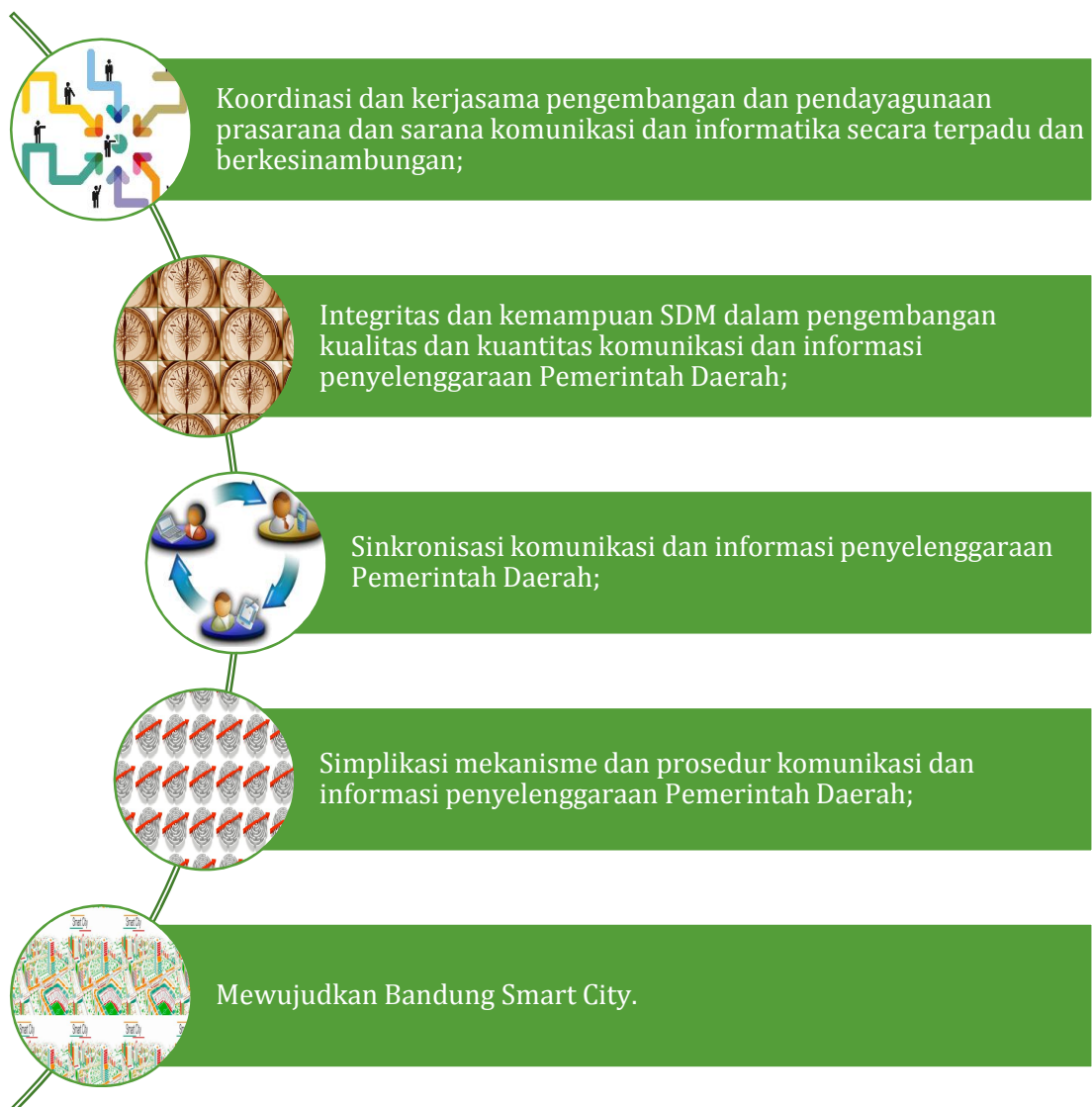


1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah No.13 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
8. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
10. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.



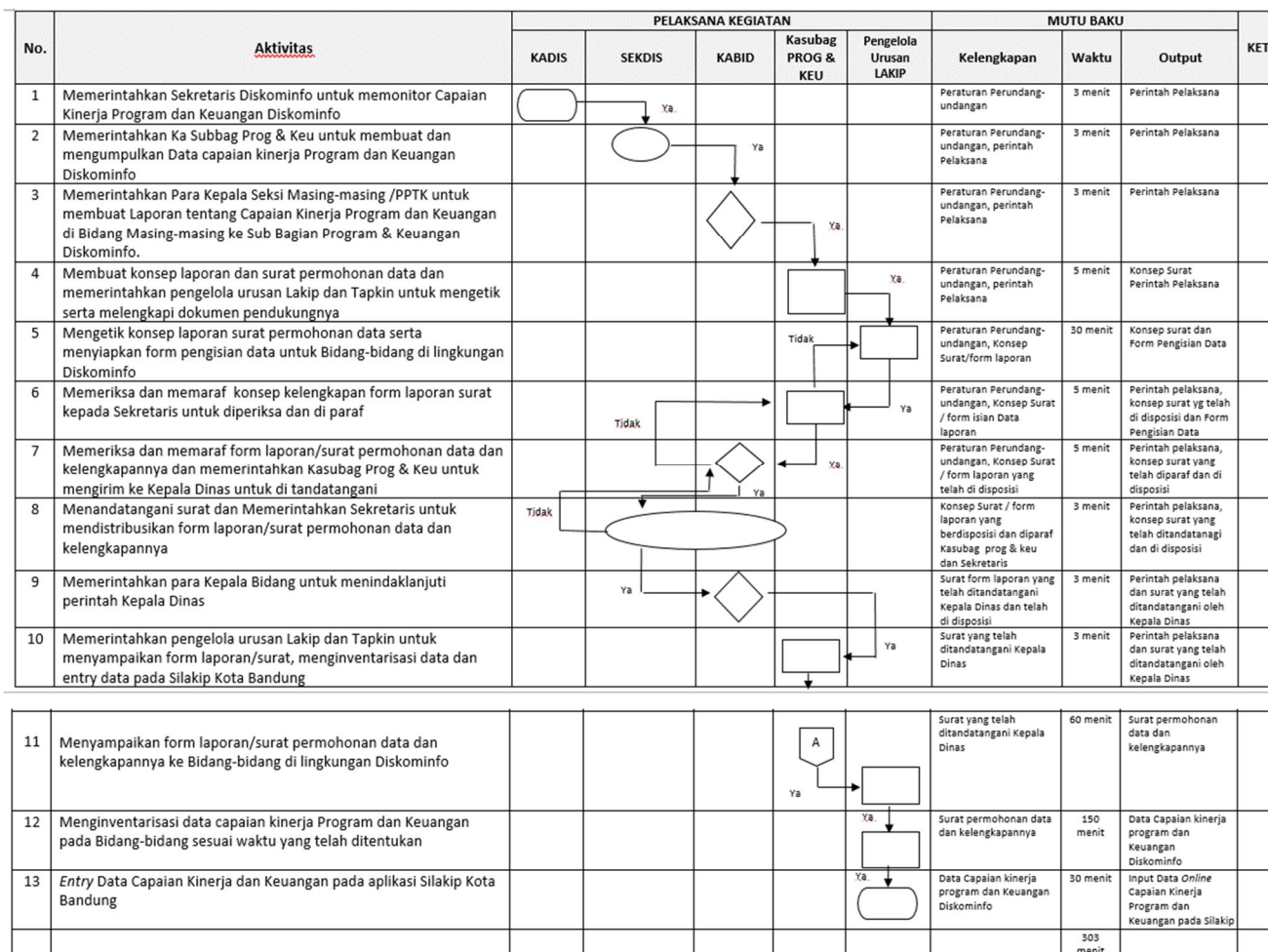
### 3. Isu Strategis yang Dihadapi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi, dan media, dan teknologi, Diskominfo Kota Bandung dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2013-2018, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Bandung. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:



#### 4. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Diskominfo Kota Bandung menggunakan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA SUBAG PROG DAN KEUANGAN TRIWULAN DI DISKOMINFO sebagai acuan. SOP ini menggambarkan pihak-pihak yang terlibat, alur kerja, serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan review kemudian hari sesuai dengan kebutuhan percepatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.



Gambar 4. SOP Pengumpulan data LKP Diskominfo

SOP di atas dijalankan secara efektif dalam 303 menit atau dalam 5 jam lebih 3 menit. Namun adalalanya dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih “mentah” dan kurang teradministrasi dengan baik, serta terbatasnya waktu dikarenakan aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif dijalankan. Kurang lebih diperlukan waktu satu minggu dalam waktu kerja untuk mengumpulkan seluruh keperluan, data, dan bahan-bahan dalam penyusunan LKIP tahun 2015 ini.

## B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Perencanaan kinerja Diskominfo Kota Bandung didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2013-2018. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung.

### Visi Diskominfo

“Terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendukung kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera”

### Misi Diskominfo

Meningkatkan dan mengembangkan layanan publik serta pemberdayaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi dan layanan informasi yang lebih merata

### Tujuan Diskominfo

Terlaksananya Reformasi Birokrasi

### Sasaran Diskominfo

Sasaran 1	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government
Sasaran2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan
Sasaran 3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran 4	Membangun citra positif Kota Bandung di media
Sasaran 5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi

## C. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

### 1. Target dan Analisis Target Renstra 2013-2018

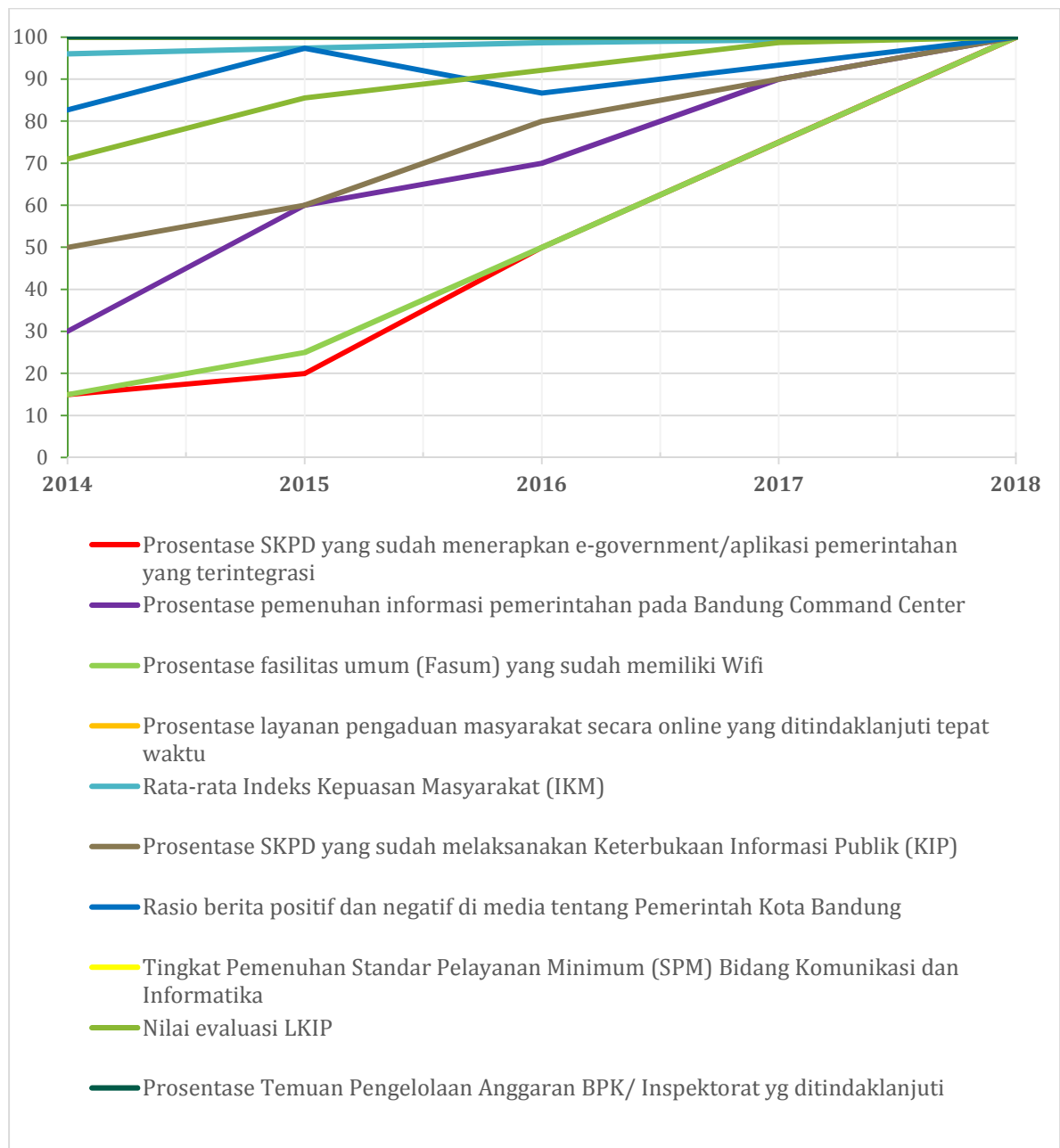
Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Diskominfo tahun 2013-2018 sebagaimana pada tabel 3.

**TABEL 3. TARGET RENSTRA 2013-2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	15	20	50	75	100
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	30	60	70	90	100
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	15	25	50	75	100
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	50	60	80	90	100
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72	73	74	74.5	75
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	62:38	73:27	65:35	70:30	75:25
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	100	100	100	100
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	54	65	70	75	76
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100

Jika target akhir pada Renstra tahun 2018 ditafsirkan sebagai target 100% kinerja pada akhir tahun Renstra, maka kita dapat melihat peningkatan target renstra per-tahun pada gambar 5. Di gambar 5, terlihat 3 (tiga) indikator tidak memiliki kenaikan target dikarenakan memiliki target 100% dari tahun ke tahun (repetitif). Beberapa target yang memiliki target 100% pada setiap tahunnya adalah:

1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu;
2. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
3. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.



**GAMBAR 5. AKUMULASI PERSENTASE TARGET RENSTRA 2013-2018**

Pada gambar 5 terlihat salah satu target mengalami penurunan target, yaitu target “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung.” Hal ini dikarenakan target yang tertera di Renstra 2013-2018 untuk tahun 2015 telah dikoreksi berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2014 dengan nilai rasio 73:27, sehingga 73:27 sebagai nilai capaian pada akhir tahun 2014 dijadikan target pada tahun 2015. Sedangkan target Renstra untuk tahun 2016 hingga tahun 2018, tidak mengalami perubahan. Karena sifat dari target kinerja ini sangatlah fluktuatif mengingat control pemerintah terhadap konten media tidak begitu besar, dengan digunakannya capaian akhir tahun menjadi target capaian kinerja pada tahun berikutnya dinilai sangat wajar. Terlebih lagi capaian pada tahun 2015 ini sangat tinggi dan membutuhkan kerja keras untuk minimal mempertahankannya.



## 2. Capaian Kinerja Tahun 2015

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

**TABEL 4. KODE WARNA SKALA PENGUKURAN ORDINAL CAPAIAN KINERJA**

Warna	Persentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target/ tidak dilakukan pengukuran
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Nomor:

060/151-Diskominfo Tanggal 29 Juni 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel 5 dengan baris warna kuning. Capaian kinerja tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel 5 di bawah ini.

**TABEL 5. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014		2015	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	15	15	20	48.00
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	30	30	60	60.65
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	15	15	25	25.00
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100	100	100	100.00
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	50	10	60	100.00
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	100	242.24	73	76.42
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	62:38	73:27	73:27	92.90:7.10
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	72	72.33	100	238.33
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	54	54.33	65	65.25
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100.00

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2015 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**TABEL 6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	%	15	15	100.00%	20	48.00	240.00%
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	%	30	30	100.00%	60	60.65	101.08%
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	%	15	15	100.00%	25	25.00	100.00%
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00%	100	100.00	100.00%
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	%	50	10	100.00%	60	100.00	166.67%
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72	72.33	100.45%	73	76.42	104.68%
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	62:38	73:27	117.74%	73:27	92.90:7.10	126.02%

Dari tabel 6 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU yang mencerminkan keberhasilan rata-rata di atas 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Indikator lainnya yang masuk dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang tidak termasuk IKU, yaitu:

TABEL 7. CAPAIAN KINERJA NON-IKU TAHUN 2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014			2015		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	%	100	242.24	242.24%	100	243.89	243.89%
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	54	54.33	100.61%	65	65.25	100.38%
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	%	100	100	100.00%	100	100.00	100.00%

Dari tabel 6 dan tabel 7 didapat capaian tertinggi diraih oleh sasaran indikator nomor 1, “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi”. Tingginya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan, serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun dengan pihak swasta/ NGO yang terlibat dalam pekerjaan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan pendukung indikator dapat berlangsung dengan lancar.

Capaian kinerja terendah dicapai oleh 3 (tiga) indikator. Walaupun termasuk rendah, ketiga indikator ini tepat mencapai target kinerja sebesar 100%. Ketiga indikator tersebut adalah: Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu, Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti. Rendahnya capaian kinerja dikarenakan sifat dari indikator itu sendiri, dimana ketiga indikator tersebut tidak mungkin memiliki capaian kinerja melebihi 100%.

### 3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

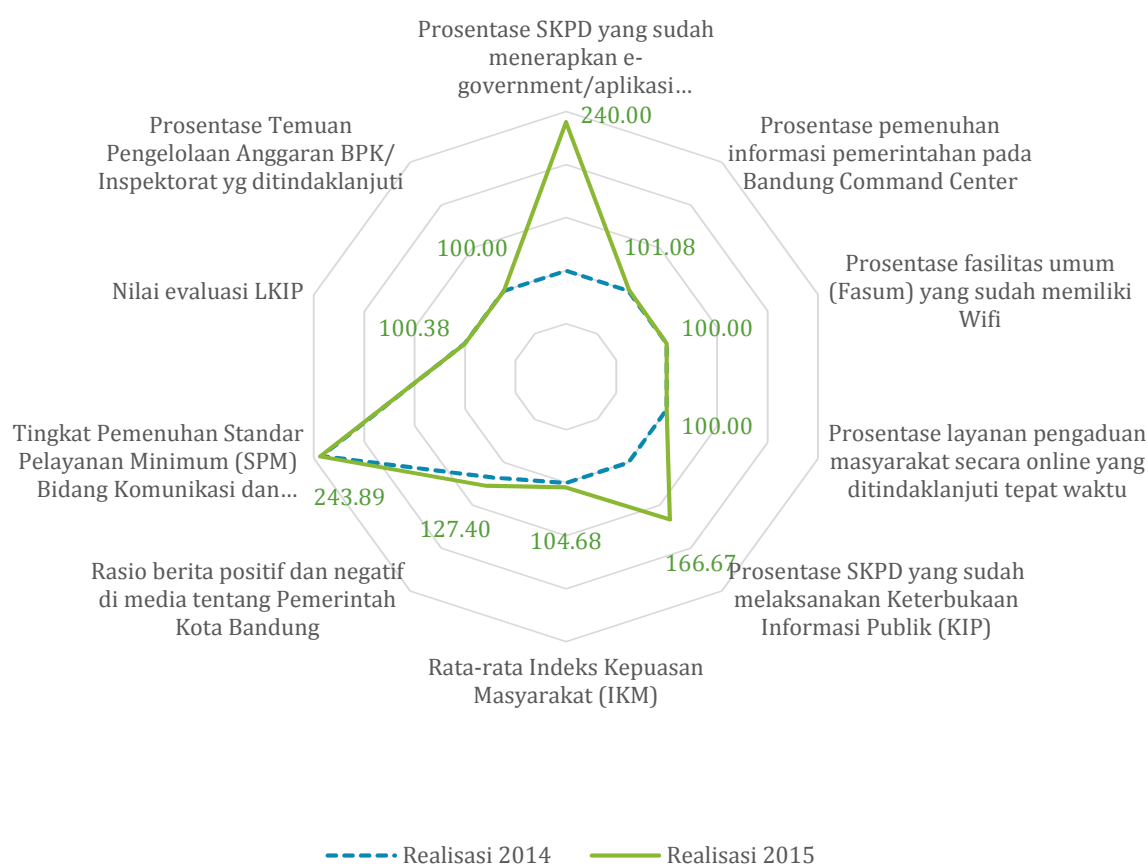
Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 (lima) sasaran.

Pada Tahun 2015 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 sasaran. Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah sebagai berikut:

TABEL 8. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi target (> 100)	7
2	Tercapai	3
3	Tidak Tercapai	Tidak ada
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

Capaian Persentase Kinerja Tahun 2014 v.s. 2015



GAMBAR 6. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2014 VS 2015

Secara umum, terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2014 ke tahun 2015, seperti ditunjukkan oleh gambar 6 di atas. Selisih capaian paling tinggi adalah pada sasaran “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi”, diikuti oleh sasaran “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”. Hanya ada satu capaian kinerja pada tahun 2015 yang berada di bawah capaian kinerja tahun 2014, yaitu pada sasaran kinerja non-IKU “Nilai evaluasi LKIP”. Walaupun terjadi penurunan, namun penurunan ini tidaklah signifikan (selisih



0.23%, atau selisih 0.08 dalam nilai LKIP dari nilai yang ditargetkan). Terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja yang memiliki capaian yang sama dengan tahun 2014 adalah: “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi”, “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu”, dan “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti”, dimana seluruh capaian kinerja mencapai 100%.

#### 4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015

**TABEL 9. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2014, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2015**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	
			2014	2015
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	100.00%	240.00%
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	100.00%	101.68%
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	100.00%	100.00%
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100.00%	100.00%
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	100.00%	166.67%
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	242.24%	104.67%
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	117.74%	118,57%
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	100.45%	238.335%
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	100.61%	100.38%
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100.00%	100.00%

Dari tabel 10, kita dapat melihat peta capaian kinerja mulai dari capaian akhir tahun 2014 hingga triwulan 4 tahun 2015. Pada tahun 2015 terlihat beberapa indikator sasaran berwarna abu yang menunjukkan tidak dilakukannya pengukuran kinerja pada triwulan tersebut. Capaian yang tepat berwarna hijau menunjukkan capaian yang tepat memenuhi target yang didefinisikan di RENstra Diskominfo 2013-2018, sedangkan yang berwarna biru menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target. Pada akhir 2015, terlihat jumlah sel berwarna biru lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kondisi ini memperlihatkan semakin banyaknya sasaran indikator yang telah berhasil dicapai melebihi dari target yang ditetapkan, serta menunjukkan peningkatan kinerja Diskominfo secara keseluruhan.

Dari tabel 12 dan tabel 13, terlihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang pengukurannya diulang pada setiap periode waktu tertentu. Artinya capaian kinerja sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhi capaian kinerja pada periode pengukuran berikutnya. Indikator –indikator tersebut adalah:

1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu;
2. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.

Dari tabel 13, terlihat bahwa 60% dari 10 capaian kinerja Diskominfo telah memenuhi target yang ditetapkan di Renstra Diskominfo tahun 2013-2018. Dari keadaan ini dapat dilakukan analisa, untuk indikator-indikator tersebut sekiranya dapat dilakukan evaluasi, apakah dapat ditingkatkan, baik target maupun dilakukan perubahan indikator secara keseluruhan menjadi indikator baru yang lebih SMART (Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time-bound) .

## 5. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2013-2018

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Renstra 2013-2018, maka data capaian dan presentase kinerja pada tahun 2014, dan tahun 2015, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaiannya Renstra, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Renstra, maupun untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Bandung secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* dari SKPD, dalam hal ini, Diskominfo Kota Bandung.

**TABEL 10. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	15,38%	48%	50%	75%	100%
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	30%	60.65%	70%	90%	100%
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	14,76%	25%	50%	75%	100%
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target		
			2014	2015	2016	2017	2018
	ditindaklanjuti tepat waktu						
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	50%	100%	80%	90%	100%
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72,3	76.42	74	74,5	75
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	73:27	93:7	65:35	70:30	75:25
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	242,24%	100%	100%	100%	100%
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	54,34	65.25	70	75	76
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL 11. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Target		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	Persentase	15,38%	48%	50%	75%	100%
2	Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center	Persentase	30%	60.65%	70%	90%	100%
3	Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi	Persentase	14,76%	25%	50%	75%	100%
4	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persentase	50%	100%	80%	90%	100%
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	96,40%	101,89%	98,67%	99,33%	100%
7	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung	Rasio	97,33%	124%	86,67%	93,33%	100%
8	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase	242,24%	238,33%	100%	100%	100%
9	Nilai evaluasi LKIP	Nilai	71,50%	85,86%	92,10%	98,68%	100%
10	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

 Sudah mencapai target RENSTRA 2013-2018

## D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Pada bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

### 1. Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi

#### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Kondisi saat ini, setiap SKP dimungkinkan untuk membangun aplikasi secara mandiri. Kendala yang muncul kemudian adalah redudansi/ duplikasi aplikasi, redudansi data, hingga *overlap* proses dan fungsi dari SKPD. Untuk itu diperlukan integrasi antar aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi terkait e-government, yaitu aplikasi pendukung kinerja pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.

#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur integrasi aplikasi-aplikasi e-government seluruh SKPD. Dengan demikian, ukuran ideal dari indikator ini adalah aplikasi-aplikasi e-government milik SKPD yang telah terintegrasi dengan Bandung Command Center. Adapun target jumlah aplikasi yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo 2013-2018 adalah sebanyak 150 aplikasi, atau rata-rata 2 aplikasi per SKPD. Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator 1} = \frac{\text{Jumlah aplikasi e - Government}}{150 \text{ aplikasi}} \times 100\%$$

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Sampai akhir tahun 2015, aplikasi yang terhubung dengan Bandung Command Center, adalah sebagai berikut:

**TABEL 12. APLIKASI DAN SKPD YANG TERINTEGRASI DENGAN BANDUNG COMMAND CENTER**  
(SUMBER: BASIS DATA BANDUNG COMMAND CENTER)

NO	APLIKASI	SKPD
1	Web Kerjasama Dalam Negeri	Bag Kerjasama
2	Web Kerjasama Luar Negeri	Bag Kerjasama
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bakumham
4	Musrenbang RKPD Online	Bappeda
5	Database Penduduk Miskin di Kota Bandung	BKBPPM

NO	APLIKASI	SKPD
6	Prodeskel PMD (Sistem Informasi Desa dan Kelurahan)	BKBPPM
7	Sistem Informasi Absensi Pegawai	BKD
8	Sistem Informasi Eksekutif Kepegawaian	BKD
9	Sistem Kepegawaian	BKD
10	Siti Kencana	BPPPKB
11	Hayu Bandung	BPPT
12	Bandung Integrated Resources Management System	BPSDA
13	Database Sentra Industri	Dinas KUKM Indag
14	Database Usaha Kecil Menengah	Dinas KUKM Indag
15	E-SKP	Dinas KUKM Indag
16	Multimedia Promosi Sentra Industri	Dinas KUKM Indag
17	Sistem Aplikasi Database PKL Kota Bandung	Dinas KUKM Indag
18	Aplikasi Gizi dan Penimbangan Balita	Dinkes
19	e-Prescription	Dinkes
20	e-Puskesmas	Dinkes
21	Sistem Informasi Puskesmas Tomi	Dinkes
22	Aplikasi tanda daftar usaha pariwisata	Disbudpar
23	Web Bandung Tourism	Disbudpar
24	Bahan Ajar	Disdik
25	Bandun Single ID	Disdik
26	Bandung Open School	Disdik
27	DISDIK Carrier Management	Disdik
28	Disdik Emergency Service unit	Disdik
29	Disdik Gateway	Disdik
30	Disdik Online	Disdik
31	DISDIK Reservoir	Disdik
32	Galeri Disdik	Disdik
33	penerimaan peserta didik baru online	Disdik
34	Rapot Sekolah	Disdik
35	Repository Bahan Ajar	Disdik
36	Sistem informasi manajemen Pendidikan	Disdik
37	Ujian/ tes online	Disdik
38	Aplikasi Kearsipan	Disdukcapil
39	Aplikasi Pendaftaran Akta Kelahiran Online	Disdukcapil
40	SIAM	Disdukcapil
41	Area Traffic Control System	DISHUB
42	E-Parking	DISHUB
43	Aplikasi Pendataan Reklame Insidentil	Diskamtam
44	Contact Center 113	DISKAR
45	Live Streaming Penanggulangan bencana	DISKAR
46	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	DISKAR
47	Inventaris Aplikasi	Diskominfo
48	Portal Kota Bandung	Diskominfo



NO	APLIKASI	SKPD
49	Bandung Integrated Manpower Management Application System Sistem Bursa Kerja Online.	Disnaker
50	Aplikasi pelayanan Survey kota Bandung	Distarcip
51	Database IMB	Distarcip
52	KRK Online	Distarcip
53	Modul Penerimaan Pajak Daerah	Disyanjak
54	Payment Gateway Pembayaran Pajak	Disyanjak
55	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak	Disyanjak
56	Aplikasi Sabilulungan	DPKAD
57	Cyber Base Audit	Inspektorat
58	Database Keanggotaan dan E-Katalog	Kapusarda
59	E-Kelurahan	Kec. Coblong
60	Sistem Informasi Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	ORPAD
61	Anti Pencucian Uang	PD BPR
62	Integrated Banking System	PD BPR
63	Kredit Melati	PD BPR
64	Mobile USSI	PD BPR
65	Sistem Informasi Debitur	PD BPR
66	Edit Data Badan Usaha	PD Kebersihan
67	Aplikasi Pengaduan via Twitter	PDAM Tirtawening
68	Aplikasi Yantap	PDAM Tirtawening
69	Billing Info System Telkom	PDAM Tirtawening
70	Billing Info System Web	PDAM Tirtawening
71	Sistem Online Payment Point	PDAM Tirtawening
72	Sistem Informasi Manajemen RS	RSKIA

Dari data tersebut, dengan menggunakan formula perhitungan capaian indikator 1, yaitu  $72 / 150 = 48.00\%$  (**Empat Puluh Delapan Persen, di atas target Renstra Diskominfo tahun 2015, sebesar 20%**). Presentase capaian kinerja pada indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” dibandingkan dengan target Renstra Diskominfo tahun 2015:  $48.00 / 20 = 240.00\%$  (**Dua Ratus Empat Puluh Persen lebih besar dari target kinerja**)

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada tahun 2014, capaian kinerja untuk indikator yang sama adalah 100%, dimana realisasi dan target sebesar 15% tepat tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian, terjadi **peningkatan capaian sebesar 240%**.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah aplikasi SKPD yang terintegrasi dengan Bandung Command Center. Capaian kinerja pada indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” telah **berhasil melampaui target kinerja** yang ditargetkan di Renstra Diskominfo tahun 2015.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di 1 Program, yaitu **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Kegiatan terkait indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” adalah **Pengelolaan Bandung Command Center**. Input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja perubahan Sebesar Rp. 8.781.250.000 teralisasi Rp. 5.995.307.542 (68,27%).

Kegiatan pada indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” telah menghasilkan output:

- ✓ Perangkat Server untuk Bandung Command Center;
- ✓ Perangkat lunak/ aplikasi, dan Sistem Informasi untuk Bandung Command Center;
- ✓ Informasi dari setiap SKPD yang masuk ke Bandung Command Center.

Indikator kinerja “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” **sudah efektif** dengan hasil kinerja melampaui target kinerja, serta **sudah dapat melakukan efisiensi** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2015 ini diantaranya:

- ❖ Dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan;
- ❖ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun dengan pihak Swasta/ NGO yang terlibat dalam pekerjaan bersama.

#### g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

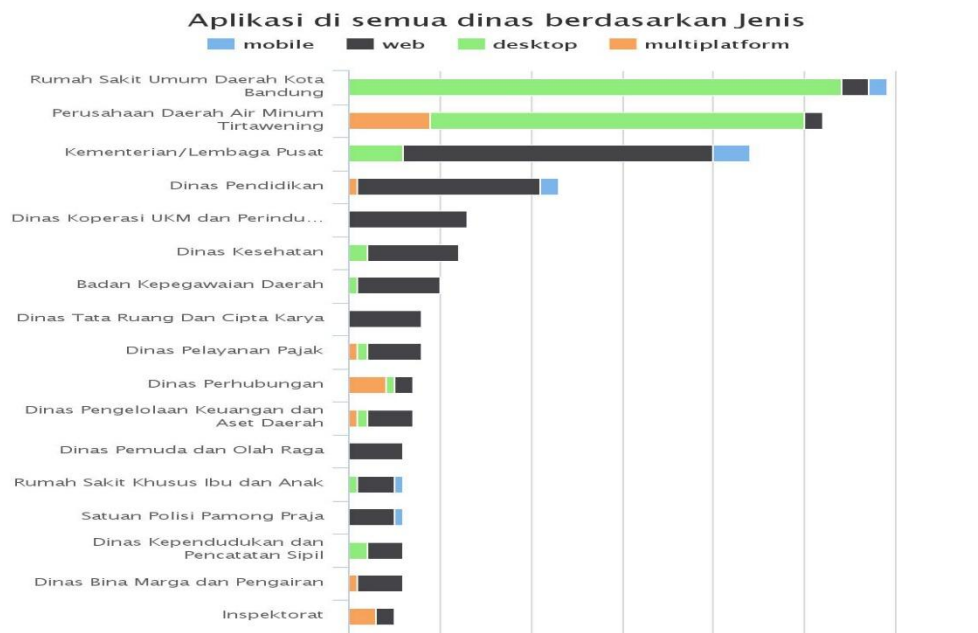
- ❖ Sisa lelang dan sisa pengadaan barang jasa (efisiensi)
- ❖ Pengadaan terkendala koordinasi
- ❖ Munculnya hambatan teknis
- ❖ Kebijakan birokrasi penyelenggaraan pekerjaan yang berubah turut berkontribusi atas perlambatan kinerja
- ❖ Adanya indent barang, sehingga pengadaan barang keluar jadwal yang ditargetkan.

#### h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Menentukan SOP, memahami, dan melaksanakan SOP tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku;
- ❖ Percepatan proses lelang, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan/ kegiatan;
- ❖ Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan, dan dengan pihak pelaksana pekerjaan/ kegiatan/ pengadaan barang/ jasa
- ❖ Memperhatikan kosekuensi dari setiap proses teknis yang sekiranya dapat mengganggu waktu, dan teknis pekerjaan.

### i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media



**GAMBAR 7. REKAPITULASI APLIKASI BEBERAPA SKPD**

Status Penggunaan	Jumlah	Jenis	Jumlah	Status Kepemilikan	Jumlah
direncanakan	41	Web	194	Kepemilikan Sendiri	294
dibangun	38	Mobile	12	Kepemilikan Pusat	47
diujicoba	33	Desktop	119	Hibah	9
dioperasikan	226	Multiplatform	26	<b>Total</b>	<b>350</b>
tidak operasional	13	<b>Total</b>	<b>351</b>		
<b>Total</b>	<b>351</b>				

**GAMBAR 8. REKAPITULASI APLIKASI BERDASARKAN KATEGORI TERTENTU**

## 2. Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center

### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Tata kelola pemerintahan berbasis e-government adalah salah satu sasaran terlaksananya Reformasi Birokrasi. Tata kelola berbasis e-government meliputi tersebarnya informasi pemerintahan secara cepat dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Dari kebutuhan tersebut dibentuklah Bandung Command Center sebagai muara informasi pemerintahan dan pengolah data untuk membantu dan mempercepat eksekutif dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat. Karena fungsinya sebagai pusat informasi, sistem yang berada di Bandung

Command Center perlu secara waktu-nyata terintegrasi dengan berbagai aplikasi e-government yang dimiliki setiap SKPD.

Pemenuhan informasi ini dapat berupa aplikasi kiosk, website maupun aplikasi berbasis mobile. Tantangan dari indikator ini adalah: SKPD sudah memiliki aplikasi/ sudah merancang aplikasi, namun belum terintegrasi, dan SKPD vital/sebagai pendukung e-government namun sama sekali belum memiliki aplikasi.

#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Target yang digunakan indikator ini adalah target kualitatif berdasarkan jumlah SKPD yang terkoneksi data dengan Bandung Command Center. Jumlah aplikasi didapatkan dari basis data aplikasi yang terdaftar dan sudah terintegrasi dengan Bandung Command Center

Menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 2} = \frac{\text{Jumlah SKPD terintegrasi}}{61} \times 100\%$$

Adapun detail 37 SKPD yang telah terintegrasi dengan Bandung Command Center adalah:

KEC. BAWET	DISPERTAPA	DISTARCIP	KAPUSARDA
KEC. COBLONG	DINAS TENAGA KERJA	DBMP	RSKIA
KEC. CINAMBO	DINAS KUKM & INDAG	BKPPM	RSKGM
KEC. ASTANAANYAR	DINAS PERHUBUNGAN	BKD	PD. BPR
DISYANJAK	DINAS PENDIDIKAN	BAPPEDA	PDAM
DISPORA	DINAS SOSIAL	BPPKB	PD. KEBERSIHAN
DINAS KESEHATAN	INSPEKTORAT	BPLH	PD. PASAR
DISBUDPAR	DPKAD	BPPT	
DINAS KEBAKARAN	DISDUKCAPIL	SETWAN	
DISKOMINFO	DISKAMTAM	TU SETDA	

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Didapatkan data 37 (tiga puluh tujuh) SKPD dari total 61 (enam puluh satu) SKPD telah terintegrasi dengan Bandung Command Center. Dengan menggunakan formula di poin (b) di atas, didapatkan angka capaian indikator 2 sebagai berikut: 37 SKPD Terintegrasi/61 target seluruh SKPD = **60.65% (di atas target 60% yang direncanakan dalam Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015)**. Sedangkan untuk presentase capaian kinerja untuk indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah 60.65/ 60 = **101.08% (melampaui target 100%)**



d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada triwulan 4 tahun 2014, target kinerja indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah sebesar 30%. Target tersebut telah dicapai dengan capaian kinerja sebesar **100%**. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan 4 tahun 2015 yang sebesar 101.08%, terjadi penambahan SKPD yang terintegrasi sebanyak 18 SKPD dari triwulan 4 tahun 2014, atau **peningkatan capaian kinerja sebesar 1.08%**.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah SKPD yang terkoneksi dengan Bandung Command Center. Capaian kinerja pada indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” telah **berhasil melampaui target kinerja** yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada triwulan 4 tahun 2015.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Kegiatan terkait indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi. Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input sesudah Penetapan Kinerja perubahan sebesar Rp. 1.893.650.000, terealisasi Rp. 1.712.756.416 (90,45%), menghasilkan output produk kebijakan, dan kajian-kajian bidang telematika.

Indikator kinerja “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” **cukup efektif** dalam mencapai hasil kinerja sesuai target kinerja, serta **dapat melakukan efisiensi** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” pada triwulan 4 ini yang paling utama adalah adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun dengan pihak Swasta/ NGO yang terlibat dalam pekerjaan bersama.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Pada indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” ini tidak ada hambatan berarti yang mengganggu kinerja

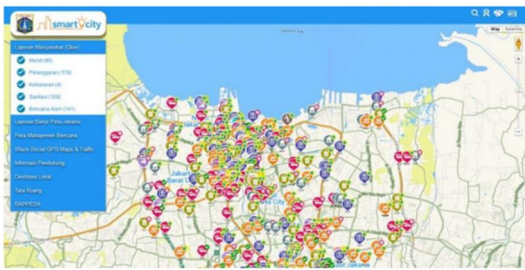
secara keseluruhan. Hal ini sebagai akibat dari sudah jelasnya tupoksi dan SOP dari setiap pihak penyelenggara pekerjaan dalam penyelenggaraan pekerjaan/ kegiatan.

#### h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat dengan melakukan:

- ❖ Percepatan proses pengadaan barang/ jasa, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan/ kegiatan;
- ❖ Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan, dan dengan pihak pelaksana pekerjaan/ kegiatan/ pengadaan barang/ jasa

#### i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media

Kutipan Media & Referensi/ URL	
<div> <p><b>News / Megapolitan</b></p> <p><b>Kalah dengan Bandung, Ahok Sebut Smart City Jakarta Payah</b></p> <p>Rabu, 18 November 2015   09:48 WIB</p> <p>29 Shares</p>  <p>Tampilan Situs smartcity.jakarta.go.id, penghimpun keluhan masyarakat</p> <p><b>Terkait</b></p> <p>Balai Kota Dibuka untuk Umum, Fasilitas Unggulan Belum Disiapkan</p> <p>Ahok Promosikan Jakarta Smart City di Hadapan Ratusan Mahasiswa Asing</p> <p><b>JAKARTA, KOMPAS.com</b> – Gubernur DKI Jakarta <b>Basuki Tjahaja Purnama</b> mengakui sistem Jakarta Smart City yang digagasnya kalah bersaing dengan sistem <i>smart city</i> milik Pemerintah Kota Bandung.</p> <p>Bandung merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia sebagai finalis "World Smart City Awards 2015".</p> </div>	
<p><a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/18/09481111/Kalah.dengan.Bandung.Ahok.Sebut.Smart.City.Jakarta.Payah">http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/18/09481111/Kalah.dengan.Bandung.Ahok.Sebut.Smart.City.Jakarta.Payah</a></p>	

Fitur > Bandung Smart City, Langkah Awal Ridwan Kamil Menuju Bandung Juara

## Bandung Smart City, Langkah Awal Ridwan Kamil Menuju Bandung Juara

Fitur 17 Aug, 2015



Bandung adalah kota yang penuh daya pikat. Cuaca, panorama alam, kuliner, ditambah masyarakat yang kreatif. Tapi, Bandung juga merupakan kota yang punya banyak masalah. Lalu lintas, sampah, dan masalah sosial seperti

<http://www.infokomputer.com/2015/08/fitur/bandung-smart-city-ridwan-kamil-menuju-bandung-juara/>

Sumber: Berita Bandung | Sabtu, 15 Agustus 2015, 04:58:00

### Jurus Wali Kota Bandung Ridwan Kamil Wujudkan Smart City



CITY TOUR: Emil memandu Bandung, wisata berpemandu yang disediakan Pemerintah Kota Bandung untuk wisatawan. Foto: Pribadi Bandung

**BERITA TERKAIT**

- BPKM Temukan Ratusan Barel Gas Berbahaya di Keluar
- TERUNGKAP: 5 Hal Menarik Soal Hubungan "Tutur" Jessica dan Mima
- Man Judi Pukul, Solistaria Des di Panggung Sirkus Petal
- Koper Ratu di KFC Bikin Geger Warga
- Ruwet tak Pulang: Tempat Dukung Didi di Pohon Belimbing
- Ayah Mima Setelah Kisah Dia Mati, Coba gak Kelak...
- Beresman: Coba Mima Gak Nikah, Pasti Nyagak Mati

Later belakangan sebagai arsitek dan master tata kota dimanfaatkan Ridwan Kamil untuk mengubah wajah Bandung yang sempat kusam. Melalui kiprahnya selama hampir dua tahun menjadi wali kota, impian mewujudkan Bandung sebagai smart city sangat mungkin terwujud.

Emil –sapaan Ridwan Kamil– begitu populer. Tidak hanya di kalangan warga Bandung, tetapi juga di tingkat nasional. Dia merupakan salah seorang kepala daerah yang dianggap berhasil di Indonesia.

Ketika menjabat pertama pada 2013, Emil dihadapkan pada persoalan klasik kota. Kemacetan, pedagang kaki lima, sampah, dan infrastruktur, termasuk banyaknya jalan yang rusak. Dia pun berkeinginan menjadikan Bandung sebagai smart city.

Konsep smart city ala Emil adalah menjadikan Bandung kota digital. Setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terintegrasi. Dengan begitu, pelayanan masyarakat juga bisa dilakukan secara online. "Kami minta mahasiswa ITB membuat aplikasi online untuk memudahkan pelayanan masyarakat", katanya.

Untuk menunjang itu, dibangunlah command center di Balai Kota Bandung dengan anggaran Rp 30 miliar. Pusat komando tersebut terhubung dengan CCTV yang dipasang di 80 titik strategis Kota Bandung. Dari ruangan itu, petugas pemkot bisa memantau kemacetan lalu lintas hingga pedagang kaki lima. Awal tahun ini command center siap beroperasi. "Untuk membangun Kota Bandung, kami punya segitiga strategi, yaitu inovasi, desentralisasi, dan kolaborasi," ujar Emil.

Sebagai kota yang memiliki daya tarik pariwisata, Emil berupaya memberikan kesan positif kepada para wisatawan. Salah satu terobosan adalah dioperasikannya bus city tour yang dinamai Bandung Tour on the Bus (Bandros). Bus tingkat itu mirip dengan yang ada di Singapura dan London. Lantai 2 bus dibuat terbuka agar turis bisa menikmati city tour dengan leluasa. Bus tersebut nanti stand by di sejumlah hotel.

Untuk desentralisasi, Emil memerintah camat dan lurah secara rutin dan bergiliran makan malam bersama di rumah warga dan salat Jumat keliling kampung. "Dengan begitu, aparat jadi lebih tahu masalah yang dihadapi warganya. Jika pemimpin paham kesulitan warganya, bisa mencari solusinya dengan baik," katanya.

Emil juga mencoba berkolaborasi dengan beberapa pihak ketiga untuk mewujudkan pembangunan. Misalnya pembangunan sejumlah taman kota seperti taman film dan taman Persib. Di era Emil, taman kota di Bandung dihidupkan kembali. Beberapa taman dibuat tematik seperti Taman Lansia, Taman Jomblo, Taman Musik Centrum, Taman Fotografi, dan Taman Pustaka Bunga.

<http://www.jpnn.com/read/2015/02/11/286821/Jurus-Wali-Kota-Bandung-Ridwan-Kamil-Wujudkan-Smart-City->

FOKUS BANDUNG FOKUS JABAR FOKUS NASIONAL FOKUS INTERNASIONAL FOKUS

HOME > BERITA HARI INI > DUA APLIKASI PENUNJANG SMART CITY RESMI DI LAUNCHING



## Dua Aplikasi Penunjang Smart City Resmi di Launching

© Jumat, 10 Juli 2015 Author: FOKUSJabar.com 0

**BANDUNG, FOKUSJabar.com:** Wali Kota Bandung Ridwan Kamil resmi meluncurkan aplikasi harga Pasar Online dan Panic Button di ruang Bandung Command Center (BCC). Menurut Ridwan, aplikasi tersebut dua dari ratusan aplikasi yang akan dikembangkan di Kota Bandung.

"Disinilah mimpi smart city dibangun," ucap Ridwan usai meresmikan dua aplikasi di Balai Kota Bandung Jati Wastukencana, Jumat (10/7/2015).

Ridwan menjelaskan, aplikasi harga pasar online memiliki fungsi sebagai kontrol dan pengawas harga komoditi pangan di pasaran. Diharapkan, jika terjadi persoalan di lapangan dapat segera terselesaikan.

"Biasanya, saat harga melonjak dan warga resah dan ada gejolak, pemerintah baru turun ke lapangan. Nah, dengan aplikasi ini, sebelum terjadi naiknya kita lakukan turun harga karena kita sudah nanti."

<http://fokusjabar.com/2015/07/10/dua-aplikasi-penunjang-smart-city-resmi-di-launching/>

### 3. Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi

#### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Maraknya penggunaan internet sebagai fasilitas untuk bekerja, bersosialisasi, dan hiburan telah menjangkau berbagai kalangan, baik usia tua, muda, professional, pengusaha, pelajar, hingga anak-anak, dan angka penetrasi dan literasi Internet kian menaik seiring mudah dan murah akses terhadap Internet. Wifi yang terhubung dengan koneksi Internet merupakan media dasar komunikasi yang populer saat ini. Fasilitas umum disini meliputi taman dan area publik, pusat transportasi, dan tempat ibadah (berdasarkan permintaan). Bandung menuju Smart City meng-amanahkan interaksi dan turut serta warga dalam pembangunan kota. Pembangunan titik-titik wifi ini membantu mewujudkan konektifitas, baik antar warga, dan warga dengan pemerintah.

#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Indikator kinerja dihitung berdasarkan capaian pemasangan titik Wifi yang aktif terkoneksi dengan Internet, dibandingkan dengan target pemasangan yaitu 332 titik Wifi di Kota Bandung, menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 3} = \frac{\text{Jumlah fasum terpasang wifi}}{332} \times 100\%$$

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Pada triwulan 4, sudah terpasang 83 titik wifi yang terpasang,

**TABEL 13. TITIK-TITIK WIFI YANG SUDAH TERPASANG**

No	Lokasi	Segmen
1	TAMAN KOTA CIKAPAYANG DAGO; JL. IR. H. JUANDA; TAMAN SAMPING KIRI	TAMAN & PUBLIK AREA
2	TAMAN PASUPATI/TAMAN JOMBLO; JL. TAMANSARI; DEPAN TAMAN BAG. KIRI	TAMAN & PUBLIK AREA
3	TAMAN SUPRATMAN; JL. SUPRATMAN; DPN PUSENIF	TAMAN & PUBLIK AREA
4	TAMAN GASIBU; JL.DIPONEGORO; DPN GD.SATE SBLH KNAN	TAMAN & PUBLIK AREA
5	TAMAN PASUPATI/TAMAN JOMBLO; JL. TAMANSARI; DEPAN TAMAN BAG. KANAN	TAMAN & PUBLIK AREA
6	TAMAN MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT; JL. SURAPATI; DEPAN UNPAD	TAMAN & PUBLIK AREA
7	TAMAN PANATAYUDA; JL. PANATAYUDA NO.2; SISI KIRI TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
8	TAMAN PASUPATI/TAMAN JOMBLO; JL. TAMANSARI; TENGAH TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
9	TerminalCicaheumJalan Jenderal Abdul Haris Nasution	PUSAT TRANSPORTASI
10	TAMAN PUSAKA BUNGA; JL. CILAKI; PINTU MASUK TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
11	MASJID SALMAN ITB; JL.GANESHA NO.7; RUMAH KAYU	MASJID
12	TAMAN GASIBU; JL.DIPONEGORO; DKT POS/DPN GD.SATE	TAMAN & PUBLIK AREA

No	Lokasi	Segmen
13	TAMAN ANGGREK; JL. ANGGREK; DEPAN JOE CAFE	TAMAN & PUBLIK AREA
14	TAMAN GASIBU; JL.DIPONEGORO; DPN PINTU MSK SBLH KIRI	TAMAN & PUBLIK AREA
15	REST AREA KM 125; JL. RAYA TOL PURBALEUNYI KM. 125; LT.2 PUJASERA	TAMAN & PUBLIK AREA
16	TAMAN CEMPAKA; JL. ANGGREK; DEPAN TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
17	TAMAN SUPRATMAN; JL. SUPRATMAN; SISI KIRI DPN TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
18	TAMAN PASUPATI/TAMAN JOMBLO; JL. TAMANSARI; BELAKANG TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
19	TAMAN SUPRATMAN; JL. SUPRATMAN; DPN JL.JAMUJU	TAMAN & PUBLIK AREA
20	BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRANEGARA; LT2; R. TUNGGU INTERNATIONAL	PUSAT TRANSPORTASI
21	TAMAN PUSAKA BUNGA; JL. CILAKI; TENGAH TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
22	TAMAN ANGGREK; JL. ANGGREK; SEBERANG SMP SANTA URSULA	TAMAN & PUBLIK AREA
23	TAMAN PANATAYUDA; JL. PANATAYUDA NO.2; SISI KANAN TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
24	MASJID SALMAN ITB; JL.GANESHA NO.7; LORONG KANTIN	MASJID
25	Jalan_Kaum_Kaler_Alun2_Uber	TAMAN & PUBLIK AREA
26	BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRANEGARA; LT1; R. CHECK IN	PUSAT TRANSPORTASI
27	TEMART; JL. TELEKOMUNIKASI NO 1; DEPAN TEMART	TAMAN & PUBLIK AREA
28	TAMAN ANGGREK; JL. ANGGREK; DEPAN RM. PARIT SEAFOOD	TAMAN & PUBLIK AREA
29	TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DPN MIE BASO BANDA	TAMAN & PUBLIK AREA
30	TAMAN KOTA CIKAPAYANG DAGO; JL. IR. H. JUANDA; TAMAN TENGAH	TAMAN & PUBLIK AREA
31	TAMAN CENTRUM; JL.BELITUNG; PEREMPATAN JL.BELITUNG SUMBAWA	TAMAN & PUBLIK AREA
32	TAMAN CEMPAKA; JL. ANGGREK; SAMPING KIRI TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
33	Terminal_LeuwiPanjang	PUSAT TRANSPORTASI
34	TAMAN LALU LINTAS ADE IRMA SURYANI; JL.BELITUNG NO.1; DPN R.SEKRETARIAT	TAMAN & PUBLIK AREA
35	BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRA NEGARA; DPN R. INFORMASI	PUSAT TRANSPORTASI
36	GOR CITRA; JL.CIKUTRA NO.278; PARKIRAN DPN	TAMAN & PUBLIK AREA
37	TAMAN FLEXI; JL. IR. H. JUANDA; SEBELAH KANAN TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
38	TAMAN CENTRUM; JL.BELITUNG; SEBRANG RM.PADANG TRIO JAYA	TAMAN & PUBLIK AREA
39	BANDARA HUSEIN; JL HUSEIN SASTRANEGARA; R. KEDATANGAN PUBLIK	PUSAT TRANSPORTASI
40	TAMAN CENTRUM; JL.BELITUNG; DPN SMAN 5	TAMAN & PUBLIK AREA
41	TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DPN ARENA XPRNC	TAMAN & PUBLIK AREA
42	TAMAN PRAMUKA; JL. RE MARTADINATA NO 157; TAMAN BELAKANG	TAMAN & PUBLIK AREA
43	BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRA NEGARA; LT2; R. TUNGGU DOMESTIK	PUSAT TRANSPORTASI
44	TAMAN TEUKU UMAR; JL. TEUKU UMAR; KANAN TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
45	REST AREA KM.147; JL.TOL PURBALEUNYI KM.147; DPN CFC	TAMAN & PUBLIK AREA
46	TAMAN LALU LINTAS ADE IRMA SURYANI; JL.BELITUNG NO.1; DKT TMPT MKN	TAMAN & PUBLIK AREA

No	Lokasi	Segmen
47	KANTOR KELURAHAN LEBAK SILIWANGI; JL.TAMAN SARI NO.75; TIANG TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
48	TAMAN FLEXI; JL. IR. H. JUANDA; BELAKANG TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
49	TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DKT ARENA SEPEDA	TAMAN & PUBLIK AREA
50	STASIUN BANDUNG; JL.STASIUN TIMUR NO 1; 1	PUSAT TRANSPORTASI
51	POS POLISI TAMAN CIKAPAYANG BANDUNG; JL. IR. H. DJUANDA; POS POLISI	TAMAN & PUBLIK AREA
52	TERMINAL CICAHEUM; JL.AH NASUTION; kantor dishub DLLAJR gerbang pintu masuk	PUSAT TRANSPORTASI
53	Pertigaan Jl.Suci_Parkir_barat_Gasibu	TAMAN & PUBLIK AREA
54	STASIUN BANDUNG; JL.STASIUN TIMUR NO 1; 3	PUSAT TRANSPORTASI
55	TAMAN TEGALLEGA; JL. MOH. TOHA; DEPAN PINTU GERBANG	TAMAN & PUBLIK AREA
56	TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DPN JL.HALMAHERA	TAMAN & PUBLIK AREA
57	TAMAN FLEXI; JL. IR. H. JUANDA; SEBELAH KIRI TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
58	SANGGAR SENI; JL.BABAKAN SILIWANGI NO.7A; GEDUNG 2 GALERI SENI; GEDUNG 2 GALERI SENI	TAMAN & PUBLIK AREA
59	REST AREA KM.147; JL.TOL PURBALEUNYI KM.147; DPN RM Sunda PLETOK HEOT	TAMAN & PUBLIK AREA
60	Mesjid Pusdai; Jl. Diponegoro; Pintu timur masjid	MASJID
61	TAMAN TEUKU UMAR; JL. TEUKU UMAR; KIRI TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
62	TAMAN PRAMUKA; JL. RE MARTADINATA NO 157; DEPAN TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
63	TAMAN LALU LINTAS ADE IRMA SURYANI; JL.BELITUNG NO.1; SMPNG JL.MUSTAFA FARE	TAMAN & PUBLIK AREA
64	TAMAN PRAMUKA; JL. RE MARTADINATA NO 157; DPN KIRI TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
65	TERMINAL CICAHEUM; JL.AH NASUTION; KNTR DISHUB DLLAJR Hal. Dlm Halte Bus	PUSAT TRANSPORTASI
66	TAMAN KAMPUNG JUARA; JL. BIMA UTARA; KIRI TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
67	TAMAN TEGALLEGA; JL. MOH. TOHA; KANAN MUSHOLA	TAMAN & PUBLIK AREA
68	TAMAN TEUKU UMAR; JL. TEUKU UMAR; TENGAH TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
69	TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; BLKG KANTIN SAPARUA	TAMAN & PUBLIK AREA
70	TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DLM GOR SMPING KANAN	TAMAN & PUBLIK AREA
71	TAMAN KAMPUNG JUARA; JL. BIMA UTARA; KANAN TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
72	BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRANEGARA; LT2; R. RADIO & ELKTRONIK	PUSAT TRANSPORTASI
73	TAMAN PRAMUKA; JL. RE MARTADINATA NO 157; TAMAN SMPG KANAN BLKG	TAMAN & PUBLIK AREA
74	MUSEUM SRIBADUGA; JL BKR NO 185; DEKAT TAMAN	TAMAN & PUBLIK AREA
75	GOR CITRA; JL.CIKUTRA NO.278; SAYAP KIRI	TAMAN & PUBLIK AREA
76	TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DLM GOR SMPING KIRI	TAMAN & PUBLIK AREA
77	TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DKT GERBANG MSK	TAMAN & PUBLIK AREA
78	TAMAN LALU LINTAS ADE IRMA SURYANI; JL.BELITUNG NO.1; SMPNG JL.KAMBOJA	TAMAN & PUBLIK AREA
79	GEDUNG SATE BANDUNG; JL. DIPONEGORO NO. 22; DP R.PEREKONOMIAN PEMBANGUNANN	TAMAN & PUBLIK AREA



No	Lokasi	Segmen
80	STASIUN KIARA CONDONG; JL.BABAKAN SARI 2; SMOKING AREA	PUSAT TRANSPORTASI
81	MASJID AL MANAR; JL. PUTER NO. 5; DEPAN MASJID	MASJID
82	MUSEUM ASIA AFRIKA; JL.ASIA AFRIKA NO.65; SELASAR PINTU KELUAR	TAMAN & PUBLIK AREA
83	TERMINAL LEUWIPANJANG; JL.SOEKARNO HATTA NO 205; 2	PUSAT TRANSPORTASI

Untuk capaian indikator 3 didapat:  $83 / 332 = 25.00\%$  (**mencapai target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015**). Persentase capaian indikator terhadap target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015 untuk indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah:  $(25,00\%/25\%) \times 100\% = 100\%$  (**sesuai target**).

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada triwulan 4 tahun 2014, capaian kinerja indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah menacapai 18.07%, melebihi target triwulan 4 tahun 2014 sebesar 15%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan 4 tahun 2015, terjadi **peningkatan capaian kinerja sebesar 6.93%**. Namun dari sisi capaian kinerja terhadap target mengalami **penurunan sebesar 20.48%** dimana pada triwulan 4 tahun 2014, capaian kinerja terhadap target mencapai 120.48%, sedangkan triwulan 4 tahun 2015 adalah 100%.

#### e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah jumlah titik pemasangan Wifi di fasilitas umum. Capaian kinerja pada indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” telah **berhasil memenuhi target kinerja** yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada triwulan 4 tahun 2015.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Anggaran Tahun 2015 dilaksanakan di 1 (satu) Program, yaitu **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**. Kegiatan terkait indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah **Pengkajian dan pengembangan sistem informasi**. Input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja perubahan Sebesar Rp. 12.531.475.000, teralisasi Rp. 10.485.806.750 (83,68%). Menghasilkan output:



- ✓ Perangkat Wifi;
- ✓ Bandwidth Wifi di fasum, sekolah-sekolah, beberapa SKPD, beberapa Kecamatan, dan beberapa Kelurahan;
- ✓ Aplikasi terkait monitoring dan perawatan jaringan Internet beserta perawatannya.

Indikator kinerja “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” dinilai **efektif** dengan hasil kinerja sesuai dengan target kinerja, serta **dapat melakukan efisiensi** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

#### f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 pada indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah sudah **terpenuhinya fasilitas pendukung pekerjaan**. Faktor ini sangat membantu dalam pelaksanaan teknis pekerjaan.

#### g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Pada indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” **tidak ada hambatan berarti** yang mengganggu kinerja secara keseluruhan. Hal ini sebagai akibat dari sudah jelasnya tupoksi dan SOP dari setiap pihak penyelenggara pekerjaan dalam penyelenggaraan pekerjaan/ kegiatan. Adapun capaian kinerja yang tidak bertambah (pemasangan sudah di 83 titik) adalah karena sudah tercapainya target kinerja tahun 2015 (triwulan 4) yang telah dicapai pada triwulan 3. Pada triwulan 4 2015 difokuskan pada mempertahankan kinerja, karena adakalanya terjadi gangguan-gangguan (mati, lambat, dll) pada titik-titik wifi yang sudah terpasang.

#### h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut adalah:

- ❖ Dengan dipenuhinya fasilitas pendukung pekerjaan akan menaikkan moral pelaksana pekerjaan, membuat jelas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- ❖ Menggunakan tenaga ahli yang tepat baik komposisi maupun kualifikasinya juga termasuk dalam fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan.

#### 4. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu

##### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Layanan pengaduan masyarakat ditangani secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis LAPOR! UPT LAPOR! menerima pengaduan melalui beberapa media, seperti pengaduan tatp muka langsung, melalui telepon, melalui SMS, koran, radio, surel, melalui media social, ataupun melalui website/ aplikasi LAPOR!

##### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Pengukuran capaian indikator 4 dilakukan dengan melihat data total jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti tepat waktu yang masuk ke LAPOR dibandingkan dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke LAPOR. Dengan menggunakan formulasi perhitungan:

$$\text{Capaian indikator 4} = \frac{\text{Jumlah laporan yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan yang masuk}} \times 100\%$$

##### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Jumlah laporan yang diterima oleh UPT lapor selama triwulan 4 tahun 2014 adalah:

**TABEL 14. JUMLAH LAPORAN YANG MASUK KE UPT LAPOR!**

Bulan	Jumlah Laporan Masuk
<b>Oktober</b>	424 laporan
<b>November</b>	324 laporan
<b>Desember</b>	302 laporan
<b>TOTAL</b>	1.050 laporan

Total laporan pada triwulan 4 ini adalah: 1.050 (Seribu Lima Puluh) laporan, dan seluruh laporan telah ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian indikator "Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu" adalah:  $1050/1050 = 100\%$  (**tepat mencapai target triwulan 4 tahun 2015**).

##### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Capaian kinerja triwulan 4 pada tahun 2014 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan 4 Tahun 2015, menunjukkan **konsistensi kinerja** dalam menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan capaian kinerja 100% dibandingkan dengan 100%.

- e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” ini adalah:

- ✓ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu;
- ✓ SMS Blast ke seluruh pegawai Pemerintah Kota Bandung.

Indikator Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” menggunakan mata anggaran Program **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**, melalui kegiatan **Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi** yang dianggarkan sebesar Rp 1.951.002.040, dimana sudah direalisasi sebesar Rp 1.522.874.553 atau 78,06%.

Dengan melihat capaian indikator dan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan untuk indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu”, **telah berhasil mencapai target kinerja** sesuai Renstra Diskominfo yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” dinilai **efektif**, dengan hasil kinerja sesuai dengan target kinerja, serta **dapat melakukan efisiensi** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

**f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran**

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada triwulan 4 Tahun 2015 ini adalah:

- ❖ Tersedianya anggaran yang mencukupi, mendukung keleluasaan dalam lekukan kegiatan dan realisasi kinerja;
- ❖ Inovasi dari sisi integrasi dengan system social media, memudahkan pengguna untuk melapor;
- ❖ SOP kerja yang jelas mendukung percepatan dalam kinerja; serta,
- ❖ Perencanaan dan system quota pada informasi yang disebar melalui SMS Blast yang terukur.

#### g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada triwulan 4 Tahun 2015 ini adalah:


- ❖ Sistem LAPOR tidak memberikan data yang mudah dibaca, sehingga memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk diolah;
- ❖ Sistem LAPOR milik pemerintah pusat, sehingga modifikasi terhadap system tidak bisa dilakukan secara leluasa, dan cepat.

#### h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Membangun system diluar LAPOR untuk membaca, mengolah, dan kemudian menyajikan data pengaduan;
- ❖ Menganggarkan mata anggaran untuk realisasi system tersebut; serta
- ❖ Melakukan inovasi lebih lanjut seiring kemajuan teknologi.

#### i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media

Kutipan Media & Referensi/ URL	
	<p><b>MetroTVnews.com, Bandung:</b> Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil berencana menambah fasilitas wifi gratis di 300 titik ruang publik. Akses internet itu akan dipasang di tiga tempat yakni masjid, taman-taman, dan balai rukun warga.</p> <p>Awas, Situs Ini akan Merusak iPhone Anda</p> <p>APIII: Internet Perlu Dikelola dengan Baik</p> <p>Ahok Lebih Populer di Internet</p> <p>Sebanyak 300 titik fasilitas internet gratis tersebut akan melengkapi 5.000 titik yang sudah dipasang terlebih dahulu pada 2014. Namun, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku fasilitas wifi yang sudah ada hingga sekarang ini mendapat keluhan dari warga.</p> <p>"Nanti ada 300 wifi yang akan dipasang. Itu hibah dari perusahaan swasta. Itu juga akan menambah 5.000 wifi yang sudah terpasang. Tapi, yang dulu itu tidak jelas memasang untuk berapa tahun dan perawatannya seperti apa. Nah, yang baru ini sudah ada garansinya untuk tiga tahun ke depan," kata Emil di ruang kerja Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kamis (18/6/2015).</p> <p>Emil mengatakan akan mengecek kembali fasilitas wifi gratis yang sudah terpasang. Sehingga, semua wifi yang terpasang bisa digunakan oleh warga.</p> <p>"Yang lama memang masih ada. Tapi, kita cek lagi apakah harus ada yang di-reconnect lagi. Karena, memang dulu tidak detail seperti apa. Jadi, nanti saya harapkan semuanya connect lagi," imbuhnya.</p> <p>UWA</p>
<p><a href="http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/06/18/138145/manjakan-warga-bandung-emil-tambah-300-titik-bebas-internet">http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/06/18/138145/manjakan-warga-bandung-emil-tambah-300-titik-bebas-internet</a></p>	



**Bandung, CNN Indonesia** — Niat baik tak selamanya ditanggapi dengan baik pula, terutama jika tidak diikuti dengan pemahaman yang baik.

Itulah yang dirasakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang saat ini sedang gencar-gencarnya membuat Kota Kembang itu jadi lebih asri dengan membangun sejumlah taman tematik.

**Pilihan Redaksi**

- Taman Baru di Bandung untuk Anak Muda yang Ingin Gesit
- Bangun Taman Bermain Anak, Ahok akan Beli Banyak Lahan
- Bandung Punya Taman Baru Bagi Pencinta Hidup Sehat

"Ada seorang ibu menelepon saya, protes anaknya jadi tak ke sekolah karena asyik main dengan wifi gratis di taman," kata Arif Prasetya, Kepala Dinas Pertamanan Pemkab Bandung tertawa Arif hadir mewakili Walikota Bandung Ridwan Kamil yang sedianya akan meresmikan Taman Gesit, Rabu (1/4).

Arif menyebut bahwa pembangunan berbagai taman secara tematik dan berbagai fasilitasnya sebenarnya justru demi membuat anak-anak dan remaja bisa lebih kreatif mengembangkan ide dan lebih tekun belajar.

"Seperti di Taman Gesit ini, kebetulan dibangun dekat Universitas Padjadjaran. Para mahasiswa yang ingin diskusi atau berkegiatan kan bisa menggunakan ini juga," ujar Arif.

Adapun soal pengawasan warga yang memanfaatkan taman, Arif mengatakan sudah menjadi tanggung jawab bersama. "Tapi nanti kami akan menyediakan park ranger juga di setiap taman," katanya.

Demi keamanan area taman juga, pihak Nutrifood Green Committee yang mendanai Taman Gesit menyebut sudah memasang sejumlah lampu penerang taman yang sangat memadai untuk memantau kondisi taman. "Setidaknya bisa mencegah mereka yang mungkin tergoda untuk melakukan hal-hal negatif," kata Angelique, Head of Nutrifood Green Committee.

Taman Gesit berada di Jl Dipati Ukur No. 44 tak jauh dari Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Boromeus, Bandung.

<http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150401153917-269-43576/bandung-diprotes-ibu-ibu-karena-sediakan-wifi-gratis-di-taman/>

## 5. Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Sebagai penjabaran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disusun peraturan Walikota Nomor **480/Kep.179.Diskominfo/2015** tentang PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Perwal tersebut telah melingkupi peran serta seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kemudian PPID pembantu yang telah ditetapkan tersebut telah menjalankan tugasnya untuk memberikan, serta melayani permintaan informasi publik, terkecuali informasi publik yang dikecualikan. Seluruh kegiatan PPID dapat dilihat melalui website PPID Kota Bandung di <http://ppid.bandung.go.id/>

### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Formulasi perhitungan presentase kinerja indikator "Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)" adalah dengan melihat jumlah SKPD dan KECamatan yang telah tergabung kedalam PPID dan turut melaporkan data-data mereka terkecuali data yang dikecualikan. Formula tersebut dibuat dalam bentuk diformalkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator 5} = \frac{\text{Jumlah SKPD yang melaporkan data}}{\text{Jumlah SKPD id Kota Bandung}} \times 100\%$$

### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Dalam lampiran Perwal nomor 480 tahun 2015 tersebut, disebutkan PPID Pembantu yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut:

1. Direktur Umum pada PD. Kebersihan Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Setda Kota Bandung;
4. Kepala BPSDA pada Setda Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan pada Setda Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Perekonomian pada Setda Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Tata Usaha pada BPPT Kota Bandung;
8. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
9. Sekretaris BKBPM Kota Bandung;
10. Sekretaris BPPKB Kota Bandung;
11. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
12. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
13. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
15. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
16. Sekretaris Dinas Kebakaran Kota Bandung;
17. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
19. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
20. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
21. Sekretaris Dinas KUKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
22. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
23. Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
24. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
25. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;
26. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
27. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung;
28. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

29. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung;
30. Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
31. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
32. Kepala Bidang Kesekretariatan pada PDAM Tirtawening Kota Bandung;
33. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum pada PD. BPR Kota Bandung;
34. Kepala Bidang Umum pada PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;
35. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada RSUD Kota Bandung;
36. Sekretaris Camat Andir;
37. Sekretaris Camat Antapani;
38. Sekretaris Camat Arcamanik;
39. Sekretaris Camat Astana Anyar;
40. Sekretaris Camat Babakan Ciparay;
41. Sekretaris Camat Bandung Kidul
42. Sekretaris Camat Bandung Kulon
43. Sekretaris Camat Bandung Wetan;
44. Sekretaris Camat Batununggal;
45. Sekretaris Camat Bojongloa Kaler;
46. Sekretaris Camat Bojongloa Kidul;
47. Sekretaris Camat Buahbatu
48. Sekretaris Camat Cibeunying Kaler;
49. Sekretaris Camat Cibeunying Kidul;
50. Sekretaris Camat Cibiru;
51. Sekretaris Camat Cicendo;
52. Sekretaris Camat Cidadap;
53. Sekretaris Camat Cinambo;
54. Sekretaris Camat Coblong;
55. Sekretaris Camat Gedebage;
56. Sekretaris Camat Kiara Condong;
57. Sekretaris Camat Lengkong;
58. Sekretaris Camat Mandalajati;
59. Sekretaris Camat Panyileukan;



60. Sekretaris Camat Rancasari;
61. Sekretaris Camat Regol;
62. Sekretaris Camat Sukajadi;
63. Sekretaris Camat Sukasari;
64. Sekretaris Camat Sumur Bandung;
65. Sekretaris Camat Ujungberung.
66. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Setda Kota Bandung;
67. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kapusarda;
68. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSKGM Kota Bandung;
69. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSKIA Kota Bandung;

Dalam lampiran Perwal tersebut telah mencakup seluruh SKPD dan Kewilayahan/Kecamatan. Seluruh PPID pembantu telah mengisi dan menyerahkan data yang diminta untuk dilengkapi dan kemudian ditayangkan ke website PPID. Maka dari itu, capaian indikator di indikator sasaran ini telah mencapai nilai **100%**. Capaian ini telah **melebihi target** triwulan 4 tahun 2015 sebesar 60% atau **166.67% dari target kinerja**.

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Indikator sasaran "Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)" pada triwulan 4 tahun 2014 memiliki target sebesar 50%, dimana telah tepat dicapai (100%) pada triwulan 4 tahun 2014. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan 4 pada tahun 2015, pada tahun 2015 ini mengalami **peningkatan capaian kinerja sebesar 66.67%**.

#### e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari program/ kegiatan/ anggaran "Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)" adalah SKPD yang terdaftar sebagai PPID Pembantu. Capaian kinerja indikator "Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)" telah **berhasil melampaui target kinerja** yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada triwulan 4 tahun 2015.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di **Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**. Sedangkan anggaran kegiatan terkait indikator "Prosentase SKPD yang

sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” adalah **Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi**. Dalam melaksanakan kegiatan, digunakan input sesudah Penetapan Kinerja perubahan sebesar Rp. 1.893.650.000, terealisasi Rp. 1.712.756.416 (90,45%), menghasilkan output:

- ✓ Sosialisasi PPID, yang memberikan output terbentuknya PPID pembantu;
- ✓ Pelatihan dan Bimbingan Tekhnik bagi Pedasi (Petugas pengelola data dan informasi)
- ✓ Bimtek Uji Konsekuensi data yang dikecualikan dan daftar informasi bagi PPID dan PPID pembantu, output dari kegiatan ini adalah selarasnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik;
- ✓ Bimbingan teknis bagi kelompok masyarakat bidang IT Cerdas Program Nasional dan Daerah
- ✓ Kegiatan Pembuatan dan Updating Website PPID. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Website PPID yang up to date;
- ✓ Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang PPID dan Pengelolaan Data yang menghasilkan output terlaksananya RAKOR pengelolaan data dan dukungan pengolahan data secara terpusat; dan
- ✓ Pembuatan Buku Tentang Pedoman PPID dan PPID Pembantu.

Indikator kinerja “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” dinilai **sangat efektif**, dengan hasil kinerja melebihi dari target kinerja, serta **cukup dapat melakukan efisiensi** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

#### f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja di indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” pada triwulan 4 tahun 2015 ini adalah:

- ✓ Dukungan pimpinan terhadap akselerasi kinerja PPID; dan
- ✓ Kerjasama yang baik dengan seluruh PPID pembantu, menunjang kelancaran bimtek, sosialisasi dan pelatihan PPID.

#### g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Adapun faktor yang menghambat pencapaian kinerja di indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” pada triwulan 4 tahun 2015 yang paling utama adalah terbatasnya anggaran Dinas di program KIM cukup berpengaruh dalam akselerasi kinerja.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat tersebut. Rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah dengan menaikkan anggaran pada perencanaan kinerja tahun berikutnya sehingga dapat menghasilkan kerja yang lebih optimal.

i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media



GAMBAR 9. SARASEHAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA BANDUNG



GAMBAR 10. BIMTEK OPEN DATA



GAMBAR 11. PELANTIKAN PENGURUS HARIAN FORUM KIM BANDUNG JUARA



GAMBAR 12. KEGIATAN BANDUNG OPEN DATA

## 6. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

IKM adalah suatu nilai yang diyakini bersama mewakili nilai tertentu dalam kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai aspeknya yang menghasilkan indeks kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan suatu SKPD tertentu yang dijadikan subjek survey. Semakin tinggi nilai indeks diartikan sebagai semakin tingginya kepuasan masyarakat atas pelayanan SKPD. Semakin rendah nilai IKM, maka pelayanan masyarakat pada SKPD tersebut perlu untuk dievaluasi dan dilakukan inovasi, dan revisi. IKM di Diskominfo Kota Bandung mewakili kepuasan



masyarakat akan pelayanan informasi yang menjadi tupoksi utama Diskominfo Kota Bandung.

#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Survey IKM dilakukan terhadap sejumlah responden yang diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Pendapat tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kategori penilaian dengan rentang mulai dari Tidak Baik, Kurang Baik, Baik, dan Sangat Baik. Kemudian hasil survey tersebut diolah dan disajikan dalam suatu nilai indeks. Nilai indeks tersebut kemudian dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) untuk dikonversi ke dalam nilai mutu pelayanan yang akan berada dalam rentang 0 (nol/ Tidak Baik) sampai dengan 100 (seratus/ Sangat Baik).

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Hasil dari survey IKM yang telah dilakukan terhadap 161 (seratus enam puluh satu) responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. adalah sebagai berikut:

TABEL 15. TABEL NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN

KODE	UNSUR PELAYANAN	NRR	NRR*1/4
U1	Prosedur pelayanan	2,934	0,210
U2	Persyaratan pelayanan	3,053	0,218
U3	Kejelasan petugas pelayanan	3,053	0,218
U4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,143	0,225
U5	Tanggung jawab petugas pelayanan	3,086	0,220
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,054	0,218
U7	Kecepatan pelayanan	3,057	0,218
U8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,066	0,219
U9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,041	0,217
U10	Kewajaran biaya pelayanan	3,057	0,218
U11	Kepastian biaya pelayanan	3,008	0,215
U12	Kepastian jadwal pelayanan	2,980	0,213
U13	Kenyamanan lingkungan	3,078	0,220
U14	Keamanan pelayanan	3,180	0,227
Nilai Indeks			3,057

Presentase capaian indikator untuk IKM diukur dengan membandingkan nilai IKM dengan nilai IKM target triwulan 4 tahun 2015 di Renstra Diskominfo. Sehingga didapatkan nilai IKM =  $3,057 \times 25 = 76,41$

Keterangan:

U1 s.d. U14 : Unsur-unsur pelayanan

NRR : Nilai Rata Rata

NRR\*1/14 : Nilai rata-rata kali bobot rata-rata tertimban

Nilai Indeks : Nilai Persepsi

Untuk mengetahui Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita dapat berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor: KEP/25/M.pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel 15 di bawah

**TABEL 16. TABEL KONVERSI NILAI IKM**

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Dengan nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) **76,41** apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah **“BAIK”**.

Presentase capaian kinerja dihitung dengan membandingkan nilai yang didapat dengan target di Renstra, dengan nilai 73. Didapatkan Persentase capaian kinerja pada indikator “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” adalah sebesar  $76.41/73 = 104.67\%$  (**melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015**).

#### **d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya**

Pada tahun 2014, Diskominfo Kota Bandung mendapatkan nilai IKM sebesar 72,33. Nilai IKM pada tahun 2014 tersebut diatas target Renstra dimana ditetapkan sebesar 72, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,45%. Dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2015, **nilai IKM mengalami kenaikan sebesar 4,08**. Dengan persentase capaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2015 sebesar 104.67%, dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2014, terdapat **kenaikan persentase capaian kinerja dari tahun lalu, sebesar 4,22%**.

- e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Yang menjadi output dari indikator sasaran “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” adalah adanya dokumen laporan survey IKM. Indikator “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” menggunakan anggaran **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** dalam mata kegiatan **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** yang telah ditetapkan sebesar Rp 191.300.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 91.800.000 atau sebesar (47,99%).

Melihat hasil kerja nyata, dan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” mengalami **peningkatan kinerja, serta berhasil menerapkan efisensi anggaran**.

Indikator kinerja “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dinilai **cukup efektif**, dengan hasil kinerja melebihi dari target kinerja, serta **sangat efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. **Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran**

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada triwulan 4 tahun 2015 ini adalah aturan yang jelas mengenai apa dan bagaimana cara mengukur IKM turut membantu mempermudah dalam merealisasikan kinerja yaitu dengan berpedoman kepada Keputusan Menpan Nomor: KEP/25/M.pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

g. **Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran**

Faktor timbulnya berbagai masalah yang ada di lapangan dalam kegiatan survei IKM dapat bermacam-macam. Namun berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang diperoleh, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya masalah tersebut dapat disajikan uraian sebagai berikut:

1. Masalah masyarakat (responden) kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif). Hal ini penyebabnya adalah:



- ❖ kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei IKM;
- ❖ kurangnya kepercayaan responden (masyarakat) terhadap upaya perubahan paradigma PNS.

2. Masalah Petugas dan jumlah kuisioner kurang apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk kota Bandung. Hal ini penyebabnya adalah terbatasnya anggaran dalam kegiatan survey.

#### h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Berdasarkan analisa permasalahan tersebut di atas maka alternatif pemecahan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya survei indeks kepuasan masyarakat(IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (public service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan;
2. Diperlukannya konsisten para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya, ketrampilan, kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dan mau serta mampu melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
3. Perlunya peningkatan Anggaran dalam upaya mendukung pelaksanaan survei IKM.

## 7. Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung

### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Indikator “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” ditujukan sebagai alat kontrol pemerintah terhadap persepsi publik, yang dalam hal ini melalui pemberitaan-pemberitaan yang ada di media cetak koran harian. Selain itu, indikator ini dimaksudkan untuk memunculkan citra positif Pemerintah Kota dengan mengedepankan bukti prestasi atas kinerja, bukan hanya sekedar cerita.

### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Berita tentang Pemerintah Kota Bandung pada indikator ini dikhususkan kepada media cetak koran. Dari berbagai koran yang terbit di Kota Bandung, dilakukan pencarian aaas berita-berita terkait kinerja Pemerintah Kota Bandung. Kemudian berita-berita tersebut dikelompokkan menjadi dua, berita positif, dan berita negatif. Kedua kategori ini kemudian diperbandingkan dan dihitung rasio nya. Untuk menghitung persentase capaian indikator sasaran, dikhususkan kepada capaian berita positif, dengan memperbandingkan rata-rata capaian kinerja berita positif dalam selang waktu tertentu dengan target berita positif pada selang waktu yang sama dengan menggunakan formula:

$$\text{Capaian indikator 7} = \frac{\text{Rata - rata Persentase berita positif}}{\text{Target berita positif di RENSTRA/ RKT}} \times 100\%$$

### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rasio jumlah berita positif dan negative selama tiga bulan pada triwulan 4. Didapatkan data

<b>OKTOBER</b>	<b>KATEGORI BERITA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PRESENTASI</b>
	<b>POSITIF</b>	505	89,85%
	<b>NEGATIF</b>	57	10,14%
<b>NOVEMBER</b>	<b>KATEGORI BERITA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PRESENTASI</b>
	<b>POSITIF</b>	435	96,02%
	<b>NEGATIF</b>	18	3,97%
<b>DESEMBER</b>	<b>KATEGORI BERITA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PRESENTASI</b>
	<b>POSITIF</b>	490	92,80%
	<b>NEGATIF</b>	38	7,19%
<b>RATA -RATA Triwulan 4</b>	<b>KATEGORI BERITA</b>	<b>RATA-RATA JUMLAH</b>	<b>RATA-RATA PRESENTASI</b>
	<b>POSITIF</b>	476,67	92,90%
	<b>NEGATIF</b>	37,67	7,10%

Untuk pengukuran capaian kinerja, data tersebut akan dibandingkan dengan rasio berita positif pada target triwulan 4 RENSTRA/ RKT tahun 2015 dengan rasio 73:27. Dengan menggunakan formulasi di atas, didapatkan angka capaian kinerja sebesar: 92.90/ 73.00 atau sebesar **127.25% (melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015).**

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Pada triwulan 4 tahun 2014, target dari indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” ditetapkan sebesar 62:38. Capaian pada triwulan tersebut mencapai 73:27 dengan persentase capaian kinerja sebesar 117,74%. Pada triwulan 4 tahun 2015 ini, terjadi **kenaikan presentase capaian kinerja sebesar 9.51%**.

#### e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” menggunakan anggaran di **Program kerjasama informasi dengan mas media**, kegiatan **Penyebarluasan informasi pembangunan daerah** yang ditetapkan pada anggaran perubahan sebesar Rp 4.569.000.000, dan sudah dilakukan realisasi sebesar Rp 4.460.451.975 (97,62%).

Sebagai output dari kegiatan yang dilakukan di indikator ini adalah:

- ✓ Pengadaan Aplikasi IMM media report dari eBDesk
- ✓ Pengelolaan data dan manajemen arsip berita
- ✓ Advetorial Pemerintah Kota di media massa
- ✓ Bandung menjawab

Indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” telah **berhasil meningkatkan kinerja**, baik dari sisi capaian indikator, yang ditunjukkan dengan kenaikan presentase capaian kinerja, maupun dari sisi realisasi anggaran, yang ditunjukkan dengan tingginya persentase realisasi anggaran, menunjukkan **perencanaan yang tepat** indikator sasaran ini.

Indikator kinerja “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” dinilai **sangat efektif**, dengan hasil kinerja melebihi dari target kinerja, serta **cukup efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

#### f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” pada triwulan 4 tahun 2015 ini adalah:

- ❖ Terjalannya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan media massa;

- ❖ Penggunaan media social dalam menyebarluaskan berita-berita positif tentang Pemerintah Kota Bandung;

#### g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya adalah kurangnya pos anggaran untuk menyelenggarakan acara gathering dengan media massa, dimana acara ini sangat penting untuk menjalin komunikasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak media massa yang ada di Bandung khususnya.

#### h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat tersebut, kami ingin memberikan rekomendasi untuk mendukung peningkatan kinerja pada indikator sasaran ini. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah dengan mengusulkan penambahan anggaran di mata anggaran kegiatan ini pada kesempatan penganggaran berikutnya.

#### i. Dokumentasi kegiatan dan kutipan media



GAMBAR 13. IMM.TODAY NEWS REPORTING & ANALYSIS

## 8. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika

### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Standar Pelayanan Minimum Diskominfo Kota Bandung didasarkan kepada Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA. Di dalam UU dijabarkan target standar pelayanan dan panduan operasional SPM.

### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Perhitungan capaian kinerja indikator “Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika” didasarkan kepada Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA. Target standar pelayanan meliputi pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian. Perhitungan capaian kinerja, dengan capaian yang didapatkan pada akhir masa perhitungan kinerja, dibandingkan dengan target SPM dari Permenkominfo.

$$\text{Capaian indikator 8} = \frac{\text{Jumlah kegiatan SPM}}{\text{Target SPM berdasar Permenkominfo 22 2010}} \times 100\%$$

### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Target dan capaian kinerja SPM dapat dilihat dalam tabel di bawah.

**TABEL 17. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Realisasi Triwulan 4	% Capaian
		Indikator	Nilai	Target Triwulan 4		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:				
		media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali per tahun	3 kali	15 kali ILM radio	500.00%
		b) media baru seperti website (media online);	Setiap hari	Setiap hari	(Twitter, Website) Setiap hari	100.00%
		c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali per tahun	3 kali	0 kali	0%
		d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;	12 kali per tahun setiap kecamatan	3 kali	11 kali (5 kegiatan sosialisasi, 6 kegiatan Bimtek)	366.67%
		e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 kali per tahun	3 kali	4 Spanduk 1 Baligo 2 Majalah 4 CD	366.67%
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	30 kecamatan di Kota Bandung		29 kecamatan Kecamatan yang belum tercakup dalam KIM: Kecamatan Cinambo	29/30 = 96.67%
Rata-rata Capaian		$(500 + 100 + 0 + 366.67 + 366.67 + 96.67) / 6 = \mathbf{238.33\%}$				

Capaian kinerja untuk indikator “Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika” ini adalah:  $238.33 / 100 = \mathbf{238.33\%}$  **(melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015)**

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Persentase capaian kinerja pada LKIP triwulan 4 tahun 2014 adalah sebesar 242,24%. Dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2015, 238,33%, terjadi penurunan sebesar 3.91%. Namun penurunan ini tidaklah signifikan terhadap kinerja, karena masih diatas target, bahkan hingga lebih dari 2 (dua) kali dari nilai target yang ditetapkan.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Deskripsi capaian SPM dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Realisasi Kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi Tahun Anggaran 2015**

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisai Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 1 kali;

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Kelompok Informasi masyarakat di tiap tiap kelurahan di Kota Bandung yang baru tercapai sebanyak 113 Kelurahan dan 1 (satu) Forum KIM Kota bandung;

2. Kegiatan Bimbingan teknis Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 2 kali;

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemahaman masyarakat akan program pembangunan di kota Bandung dan menambah pengetahuan masyarakat akan Teknologi Informasi;

3. Kegiatan Saresehan pada masyarakat perkotaan sebanyak 2 kali

Output dari kegiatan ini menampung aspirasi masyakat dan menyampaikan program program pemerintah kota bandung melalui tatap muka

4. Kegiatan Sosialisasi Open Data sebanyak 1 kali;

Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya pengolah data informasi di tiap tiap SKPD yang ada di Kota Bandung

5. Kegiatan Bimbingan teknis Open Data sebanyak 3 kali;

Output dari kegiatan ini adalah membentuk pengelola data informasi yang menguasai IT, Humas dan Jurnalistik

6. Kegiatan sosialisasi PPID sebanyak 1 kali;



Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya PPID Pembantu di tiap tiap SKPD yang ada di kota Bandung

7. Kegiatan Bimbingan teknis PPID sebanyak 1 kali;

Output dari kegiatan ini adalah selarasnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik

8. Kegiatan Pembuatan dan Updating Website PPID, Open Data Dan KIM

Output dari kegiatan tersedianya Website PPID, Open data dan KIM Kota Bandung yang up to date.

9. Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang PPID dan Pengelolaan Data

Output dari kegiatan terlaksananya RAKOR pengelolaan data dan dukungan pengolahan data secara terpusat;

10. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat

Output dari kegiatan ini tercapainya diseminasi informasi kepada masyarakat melalui program tatap muka.

11. Kegiatan Siaran di radio sonata oleh Forum KIM Bandung Juara Kota Bandung

Output dari kegiatan ini adalah tercapainya diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan didengarkan oleh masyarakat mengenai pemerintah kota bandung yang dilaksanakan tiap minggu setiap hari rabu

12. Kegiatan Scrapthon

Output merubah data yang tidak bisa dibaca oleh mesin menjadi dapat dibaca oleh mesin dan mengajak partisipasi aktif masyarakat.

13. Kegiatan Launching Open Data

Output dari kegiatan ini adalah mewujudkan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

14. Kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Dengan IBM dan ABV

Output dari kegiatan ini rekomendasi kegiatan peningkatan kualitas SDM pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

### Realisasi Kerja Seksi Komunikasi dan Multimedia Tahun Anggaran 2015

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Operasional Majalah swara Bina Kota sebanyak 2 kali terbit dalam bentuk tabloid dan 4 kali terbit dalam bentuk CD

Output dari kegiatan terbitnya majalah Swara bina Kota selama dua (2) bulan.

2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Elektronik adalah sebagai berikut:

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Dialog Interaktif di TV sebanyak              | 17 kali;  |
| b. Dialog interaktif di radio sebanyak           | 30 kali;  |
| c. Radio spot sebanyak                           | 356 kali; |
| d. Iklan layanan masyarakat di radio sebanyak    | 118 kali; |
| e. Iklan layanan masyarakat di televisi sebanyak | 252 kali; |

Output terlaksananya kerjasama dengan media elektronik.

3. Kegiatan Penyebarluasan masyarakat melalui Pentas Pertunjukan Rakyat

Output dari kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi dengan memberdayakan kebudayaan masyarakat

### Output yang telah dicapai Tahun 2015 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat yang berwawasan Teknologi Informasi, meliputi kegiatan:

- ✓ Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah
- ✓ Penyebarluasan Informasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
- ✓ Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemkot Bandung

Indikator sasaran "Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika" menggunakan anggaran di **Program kerjasama informasi dengan mas media**, dengan kegiatan **Pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi** yang ditetapkan pada anggaran perubahan sebesar Rp 1.438.850.000, dan sudah dilakukan realisasi sebesar Rp 1.437.041.000 (99,87%).

Indikator kinerja "Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika" dinilai **sangat efektif**, dengan hasil kinerja

melebihi dari target kinerja, serta **cukup efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

**f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran**

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 ini adalah

- ✓ Tumbuhnya motivasi dengan didapaknya 2 (dua) penghargaan atas kinerja KIM Kota Bandung.

**g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran**

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya adalah:

- ✓ SPM sesuai Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 memiliki target pertunjukkan rakyat yang cukup sulit untuk direalisasikan karena terkendala anggaran;
- ✓ Terbatasnya anggaran sosialisasi membuat adanya pembatasan kegiatan agar tidak melebihi pagu anggaran;
- ✓ Di sisi lain, beberapa target SPM yang mudah dicapai. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bagian ORPAD, perlu adanya peningkatan target kinerja menuju Standar Pelayanan Prima (SPP).

**h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran**

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah adanya penambahan anggaran pada program/ kegiatan pemenuhan SPM menuju Standar Pelayanan Prima. Untuk menuju SPP, diperlukan adanya kajian dan penelitian untuk menentukan target kinerja SPP.

## 9. Nilai evaluasi LKIP

**a. Penjelasan umum sasaran dan indikator**

LKIP adalah dokumen berisi laporan kinerja dari SKPD yang dikeluarkan secara rutin, baik dalam rentang triwulanan, maupun tahunan. LKIP menggambarkan performansi kinerja dari suatu SKPD, menunjukkan komitmen atas target yang telah dirancang pada awal masa kerja. LKIP ini kemudian dievaluasi oleh Inspektorat Kota Bandung untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan, baik dari sisi perencanaan, formulasi penilaian, dan aspek-aspek kinerja lain yang

perlu untuk dievaluasi untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Nilai evaluasi LKIP digunakan sebagai indikator untuk sasaran terciptanya Reformasi Birokrasi.

#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Nilai evaluasi LKIP dikeluarkan oleh Inspektorat sebagai lembaga yang berwenang melakukan evaluasi. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan ekpetansi nilai atau target yang tertera di Renstra Diskominfo.

Persentase capaian kinerja indikator dihitung dengan formula:

$$\text{Capaian indikator} = \frac{\text{Nilai evaluasi LKIP yang diterima}}{\text{Target nilai evaluasi LKIP}} \times 100\%$$

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Nilai evaluasi LKIP didapatkan dari hasil penilaian oleh Inspektorat Kota Bandung melalui dokumen nomor **710/09-Inpektorat**, perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2014. Diskominfo Kota Bandung mendapatkan nilai LKIP sebesar **65.25 (enam puluh lima koma dua lima)** dengan **kategori B (Baik)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Nilai ini berada di atas target triwulan 4 Renstra 2013-2018 yang ditetapkan, sebesar 65.

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{65.25}{65} \times 100\% = \mathbf{100.38\%}$$

Menghasilkan presentase kinerja pada indikator sasaran Nilai Evaluasi LKIP sebesar **100.38% (melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015)**.

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2014, dimana target yang ditetapkan adalah nilai LKIP 54, dan nilai LKIP yang didapatkan adalah 54,33. Dengan demikian persentase capaian kinerja yang didapatkan pada triwulan 4 tahun 2015 adalah sebesar 100,61%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja triwulan 4 tahun 2015, terjadi sedikit penurunan yang tidak signifikan (sebesar 0,23%). Namun capaian kinerja dari tahun 2014 dapat dipertahankan di atas target yang telah ditetapkan. Ini **menunjukkan perbaikan dan peningkatan kinerja**, dimana **target perencanaan dapat dicapai** dengan baik dalam dua tahun terakhir ini.

- e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Sebagai output dari indikator “Nilai evaluasi LKIP” adalah:

- ✓ Adanya dokumen LKIP triwulan 1, 2, 3, dan 4;
- ✓ Adanya dokumen LKIP tahun 2014, dan 2015;
- ✓ Terbentuknya komitmen Dinas dalam mendukung SAKIP Juara;
- ✓ Tersusunnya SOP pengumpulan data SAKIP;

Indikator “Nilai Evaluasi LKIP” ini didukung oleh anggaran pada **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**, di kegiatan **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** yang telah dianggarkan sebesar Rp 191.300.000. Dimana dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 91.800.000 (47,99%).

Berdasarkan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, didapatkan memang didapatkan penurunan capaian kinerja. Namun penurunan tersebut bukan berarti penurunan kinerja, namun justru **peningkatan**, dikarenakan target kinerja yang juga naik/ lebih tinggi dari target pada tahun sebelumnya **dapat dicapai** dan diikuti oleh **efisiensi anggaran**.

Indikator kinerja “Nilai Evaluasi LKIP” dinilai **cukup efektif**, dengan hasil kinerja memenuhi target kinerja, serta dinilai **sangat efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. **Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran**

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2015 ini adalah:

- ❖ Koordinasi yang baik dengan Bagian OPRPAD Kota Bandung membantu menghasilkan LKIP yang berkualitas, dan tepat waktu;
- ❖ Ditindaklanjutinya evaluasi dan masukkan yang diberikan ORPAD, dan Inspektorat terkait LKIP SKPD turut berperan dalam menghasilkan LKIP yang lebih baik lagi.

#### g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

- ❖ Kurangnya kesadaran akan pentingnya LKIP oleh para pemegang program, menimbulkan kesulitan dalam pengumpulan data karena LKIP tidak menjadi prioritas utama; dan
- ❖ Penjadwalan laporan yang terkadang bentrok sehingga tidak tertangani dengan maksimal.

#### h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

- ❖ Sosialisasi internal akan pentingnya LKIP di lingkungan Dinas dengan mengundang Bagian ORPAD/ Inspektorat/ BAPPEDA Kota Bandung sebagai narasumber;
- ❖ Perlu adanya koordinasi yang *real-time* antara pemilik kepentingan dan pelaksana pembuat laporan kinerja, baik di bidang anggaran maupun kinerja, untuk penjadwalan laporan agar tidak terjadi load pekerjaan yang menumpuk di suatu waktu.

### 10. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

#### a. Penjelasan umum sasaran dan indikator

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi dan memberikan masukan serta rekomendasi terkait pengelolaan keuangan negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. INSpektorat adalah lembaga internal Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertugas melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, serta memberikan rekomendasi atas berjalannya system birokrasi di Pemerintah Kota Bandung, baik dari sisi keuangan, prosedur, dan sebagainya.

Rekomendasi tersebut dituangkan dalam dokumen berisi temuan atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan keuangan. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan. Melakukan tindak lanjut atas temuan adalah hal mutlak bagi berjalannya birokrasi yang bersih, dan melayani.

#### b. Instrumen/ cara perhitungan indikator

Perhitungan indikator dilakukan dengan menghitung jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti, dibandingkan dengan jumlah total temuan. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator} = \frac{\text{Jumlah temuan BPK Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah temuan}} \times 100\%$$

#### c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja

Hingga akhir triwulan 4, hasil dari pemeriksaan BPK belum didapatkan. Sedangkan dari hasil pemeriksaan Inspektorat terkait pengelolaan anggaran, didapatkan **3 (tiga) temuan** pengelolaan anggaran, dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti **(100%) (mencapai target)**.

#### d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja pada indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang sama dengan tahun 2015 pada angka **capaian 100%**. Ini **menunjukkan kinerja dalam mempertahankan kinerja**.

#### e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja

Output dari kegiatan pada indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” adalah dokumen jawaban/ tanggapan Dinas atas temuan dari BPK/ Inspektorat.

Indikator ini menggunakan anggaran di **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** yang ditetapkan sebesar Rp 299.050.000 dan sudah di realisasi sebesar Rp 166.386.400 **(55,64%)**.

Indikator kinerja “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” dinilai **efektif**, dengan hasil kinerja memenuhi target kinerja, serta dinilai **sangat efisien** dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

#### f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 ini adalah komunikasi yang baik internal SKPD, dan dengan pihak evaluator.



g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Di indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” tidak menemukan hambatan yang berarti karena kegiatan terdokumentasi dengan baik, sehingga dalam mengeluarkan jawaban atas temuan

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat tersebut adalah adanya penjadwalan kinerja antar berbagai pemilik kepentingan yang terkait (Inspektorat, BPK) sehingga pada saat masa pelaporan LKIP, SKPD sudah memiliki data yang diperlukan.

## E. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Untuk mencapai Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan percepatan pencapaian target kinerja Renstra, perlu disusun rencana aksi yang akan mendukung pencapaian serta persiapan penyusunan rencana kerja tahun 2016.

Capaian yang sudah maksimal akan dilakukan peninjauan untuk peningkatan kinerja di tahun 2016. Beberapa indikator kinerja yang akan mengalami perubahan diantara nya

SEBELUM	SESUDAH
Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Prima Bidang Komunikasi dan Informatika
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Prosentase Penurunan Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat

Untuk melakukan perubahan terhadap indikator kinerja tersebut perlu dilakukan kajian studi yang melibatkan beberapa pihak, terutama Bagian ORPAD Sekretariat Daerah Kota Bandung, BAPPEDA Kota Bandung, Inspektorat kota Bandung, akademisi dan professional pemerintahan (Kementrian PAN-RB) untuk berkonsultasi, melakukan evaluasi, sekaligus monitoring proses perencanaan kinerja yang berada di Diskominfo Kota Bandung.

Selain perubahan indikator, evaluasi terhadap indikator yang sudah mencapai target Renstra perlu dilakukan evaluasi. Apakah akan mengalami perubahan atau hanya perubahan pada bentuk kegiatannya saja tanpa merubah nomenklatur indikator sasaran yang tertera pada Renstra 2013-2018 Diskominfo Kota Bandung. Beberapa indikator sasaran yang telah mencapai target renstra diantaranya:

1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu;
2. Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
3. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung;
5. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.

## F. KESIMPULAN/ PENUTUP

**L**KIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung triwulan 4 tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 ( Lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung triwulan 4 tahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Desember 2015  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**H. AOS W.A. BINTANG, SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610815 199301 1 001